

Triwulan III

LAPORAN

KINERJA

DIREKTORAT
Kepelabuhanan
Perikanan



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah memanfaatkan *Balanced Scorecard* sejak tahun 2013 sebagai alat strategis dalam proses manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Pendekatan ini memastikan seluruh unit organisasi terhubung secara vertikal maupun horizontal, dengan tujuan akhir mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). *Balanced Scorecard* juga berperan penting dalam

mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. *Balanced Score Card* menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan senantiasa mengoptimalkan pelaksanaan seluruh rencana aksi secara efektif dan efisien, dengan berorientasi pada target indikator kinerja yang ditetapkan. Seluruh pencapaian tersebut dirangkum dalam Laporan Kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan III Tahun 2025 ini memuat gambaran pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sektor perikanan tangkap selama satu tahun. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait dalam memahami pelaksanaan tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Jakarta, 15 Oktober 2025
Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Candra

RINGKASAN EKSEKUTIF

Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN ditetapkan sebesar **Rp127.049.369.000**. Sampai dengan akhir triwulan III Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI, anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebesar Rp164.351.971.000. Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar Rp53.951.016.972 atau telah mencapai **32,83%** (sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id>). Capaian kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan pada Triwulan III Tahun 2025 masuk dalam kategori **Istimewa**, yang ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar **116%,47**.

Terkait dengan Indikator Kinerja, saat ini Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja di tahun 2025, dengan rincian capaian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Capaian TW III 2025	%
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan SKPT yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	90	60	80	120
	2. Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95			
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37			
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4			
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28,5			
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48			
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16			
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41			

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Capaian TW III 2025	%
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79			
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78			
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79			
	12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90			
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100			
	14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional (persen)	100			
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	100			
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan				
	16. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87			
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	85	85	60	70,59
	18. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5			
	19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88			

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2025)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Sistematika Penyajian Laporan	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1. Rencana Strategis.....	5
2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.....	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	8
2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	12
3.3. Akuntabilitas Keuangan	69
BAB IV. PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025	6
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan TW III 2025.....	10
Tabel 3. Capaian IK Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” TW III Tahun 2025	14
Tabel 4. Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP	41
Tabel 5. Capaian IK “Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan” Triwulan III Tahun 2025	67
Tabel 6. Laporan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.	68
Tabel 7. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan triwulan III Tahun 2025	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Stuktur Organisasi Direktorat Kelabuhanan Perikanan Tahun 2025.	3
Gambar 2. Dashboard Kinerjaku Triwulan III tahun 2025 Direktorat Kelabuhanan Perikanan	10

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur pelabuhan perikanan yang memadai, aman, dan terintegrasi. Pelabuhan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas pendaratan dan distribusi hasil tangkapan, tetapi juga sebagai simpul penggerak ekonomi daerah dan nasional, serta pusat pelayanan bagi nelayan, industri perikanan, dan masyarakat pesisir.

Seiring dengan tuntutan pertumbuhan industri perikanan yang semakin dinamis, modernisasi sarana dan prasarana pelabuhan, penguatan tata kelola, serta peningkatan pelayanan di pelabuhan perikanan menjadi aspek penting dalam mendukung daya saing hasil perikanan nasional di pasar domestik maupun global. Oleh karena itu, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dituntut untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan kinerja dalam merespons berbagai tantangan, mulai dari peningkatan produktivitas, optimalisasi fungsi pelabuhan, hingga adaptasi terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Keberadaan pelabuhan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan beserta sektor pendukungnya. Oleh karena itu, pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Implementasi pembangunan yang terarah, jelas, terukur, dan akuntabel, serta penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja suatu instansi.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sepanjang tahun berjalan. Laporan ini memuat capaian kinerja, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam upaya mewujudkan pelabuhan perikanan yang profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi. Selain sebagai sarana evaluasi dan perbaikan ke depan, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dalam mendukung pembangunan sektor perikanan nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan III Tahun 2025 merupakan media informasi yang menyajikan pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selama pelaksanaan kegiatan

periode triwulan III Tahun 2025. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi yang diperoleh dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang dapat menjadi masukan penting serta referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan pelabuhan perikanan di masa mendatang. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan BAB III Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 110, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan

kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

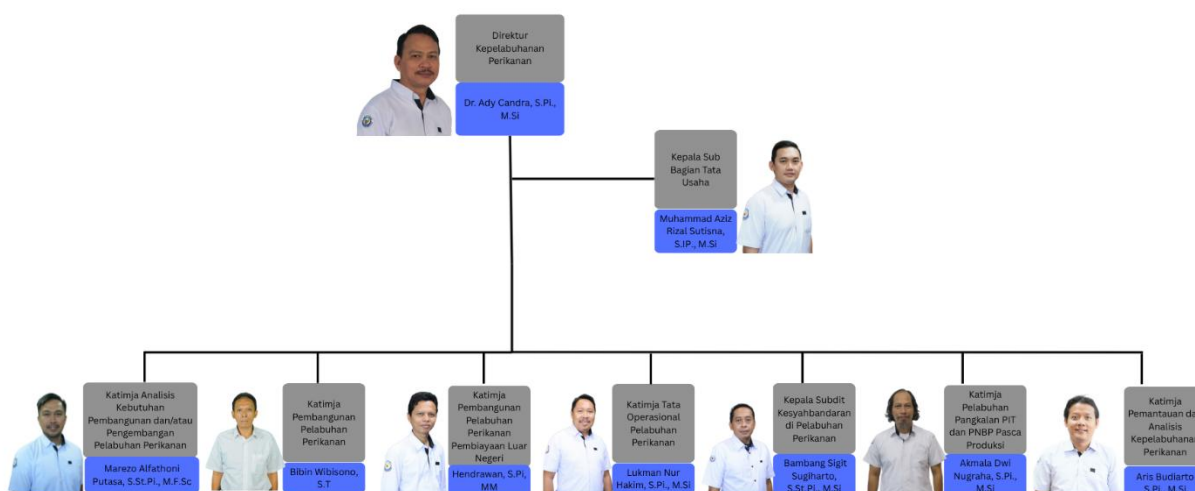
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan; pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan; pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan; pembinaan cara penanganan ikan yang baik; serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan.
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Susunan organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan membentuk 8 (delapan) Tim Kerja yang menggambarkan proses bisnis pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari analisis kebutuhan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan Pembangunan pelabuhan perikanan yang berasal dari pinjaman hibah luar negeri, pelaksanaan fungsi pengusahaan dan pengoperasian pelabuhan perikanan, pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, pengelolaan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur serta mendukung penarikan PNBP Pasca Produksi, analisis dan evaluasi kinerja pelabuhan perikanan dan unsur dukungan manajerial. Struktur organisasi Tim Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebagai berikut:

Gambar 1. Stuktur Organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025.



1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab II Perencanaan Kinerja, Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindaklanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, serta dokumen kinerja lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan subsektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEEI dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Salah satu arah kebijakan DJPT dari hasil penterjemahan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan salah satu langkah yaitu penyediaan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan unggul, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

1. pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan sesuai Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional termasuk pembangunan pelabuhan perikanan bertaraf internasional (*major project* RPJMN);
2. Penerapan standarisasi pelabuhan perikanan ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI, serta penerapan CPIB dan inspeksi pembongkaran ikan;
3. Penguatan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) untuk mendukung keterpaduan data dalam Data Sharing System (DSS);
4. Penguatan SDM pengelola pelabuhan perikanan termasuk penambahan Syahbandar perikanan;
5. Standardisasi ketersediaan kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
6. Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
7. Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
8. Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan

9. Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Pada tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menetapkan 2 Sasaran kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TAHUN
1.	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang optimal dan bertanggungjawab.					
1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	20	40	60	90	90
2	Persentase Pembangunan pelabuhan perikanan SKPT (Persen)					95
3	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)					37
4	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)					4
5	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)					28,5
6	Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)					48
7	Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)					16
8	Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)					41
9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)					79
10	Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)					78
11	Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)					79

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TAHUN
12	Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)					90
13	Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)					100
14	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan <i>Fish Market</i> Bertaraf internasional (Persen)					100
15	Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep <i>Eco Fishing Port</i> (Persen)					100
2.	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan					
16	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)		82		87	87
17	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	85	85	85	85	85
18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan					98,5
19	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)					88

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menetapkan 19 Indikator Kinerja dengan 2 Sasaran Kegiatan sebagai berikut:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070-160001 FAKSIMILE (021) 3521782
 LAMAN www.kkp.go.id SURTEL ditjenkpp@kp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ady Candra**
 Jabatan : Direktur Kepelabuhanan Perikanan
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**
 Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Pjt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Kepelabuhanan Perikanan


Ady Candra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP			
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab	1. Persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	90
		2. Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95
		3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37
		4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4
		5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28,5
		6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48
		7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16
		8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41
		9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79
		10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78
		11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79
		12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBSP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90
		13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBSP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100
		14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Ber taraf internasional (persen)	100
		15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang	100

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	
		16. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87
		17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	85
		18. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5
		19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88

Data Anggaran:

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	184.846.679.000
Total Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan		184.846.679.000

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Pjt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Kepelabuhanan Perikanan


Ady Candra

2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana Aksi sesuai perjanjian Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

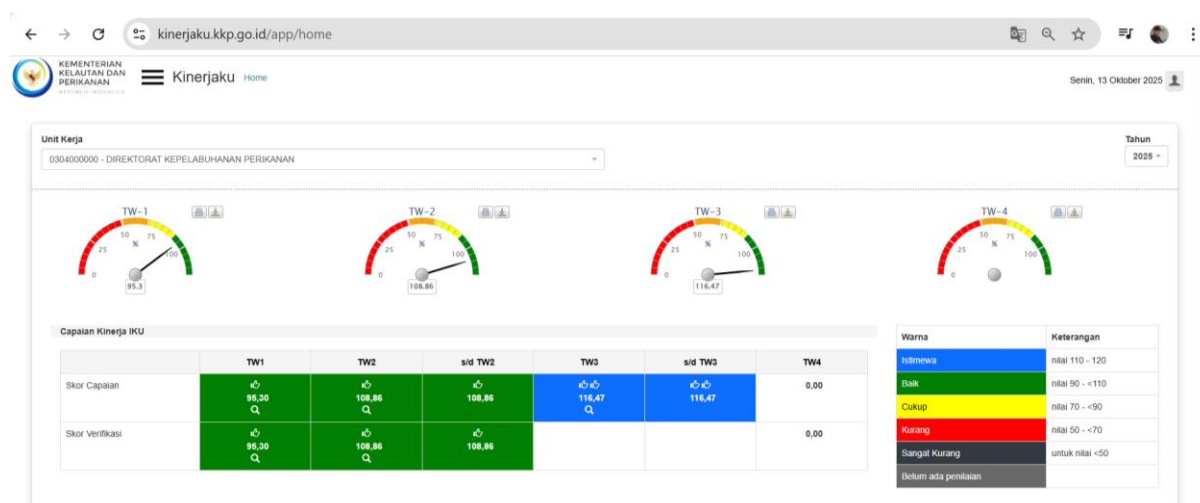
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TMJA	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PADU REVISI	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA											
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Ok	Nov	Des
1. Penguatan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Berkelanjutan (Jawa)	1. Peningkatan Pelabuhan perikanan yang berkembang dan ditugaskan keahliannya (persen)	90	F3	Prosedur Perikanan SKPT dikembangkan dan ditugaskan keahliannya (Pekerjaan Konstruksi Perikanan Struktur Sesuai Pelabuhan Perikanan Tahun SKPT Maju)	500.000.000	217.160.000	1	Dokumen												1
	2. Peningkatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95		Peningkatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasirana dan Sarana Pelabuhan Perikanan ke Monev SKPT (Sabang))			1	Dokumen												1
	3. Peningkatan Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah donatase terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37	AKP4	Peningkatan Lokasi Pelabuhan Perikanan yang donatase rencana dan kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Perikanan	1.000.000.000	309.306.000	4	Rekomendasi												4
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4		Analisa rencana kebutuhan pembangunan dan pengembangan kebutuhan perikanan berwawasan lingkungan	500.000.000															
	5. Peningkatan Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	25,5	TOPP	Prosedur Perikanan yang Ditata Tala Kelola dan Operasionalnya Sesuai Standar	90.300.000	135.215.000	22	Lembar												22
	6. Tingkat Mutu di Pelabuhan Perikanan yang Ditata Tala Kelola (Persen)	42		Pelabuhan Perikanan yang Ditata Tala Kelola dan Operasionalnya Sesuai Standar	44.915.000	44.915.000	50	orang												50
	7. Peningkatan Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16	PAKP	Peningkatan Perencanaan dan Analisis di Pelabuhan Perikanan	724.759.000	23.790.000	72	Laporan			60			60			60			72
	8. Peningkatan Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PPIP) (Persen)	41		Pengelolaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PPIP)	102.614.000	9.475.000	1	Dokumen												1
	9. Tingkat Keterlaksanaan dan Pelaksanaan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79	KSB	Integrasi Sistem Informasi Tala Kelola Pelabuhan Perikanan	172.617.000	37.897.000	105	Laporan			145			145			105			105
	10. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79		Pelaksanaan Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	114.070.500	114.070.500	1	Dokumen			1						1			1
	11. Tingkat pelaksanaan KPI Perikanan yang diadopsi melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	79		Sistem yang diadopsi Pelatihan dan Pengetahuan	30.502.300	30.502.300	30	Orang					30							
	12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PIPB Pasca Produksi di Pelabuhan Pengkutan yang ditetapkan (Nilai)	90	PIT	Supervisi dan Pendampingan Pelabuhan Pengkutan Ikan Terukur	150.000.000		30	Lembar			15			15						
	13. Pelabuhan Pengkutan yang Menerapkan PNPB Pascaproduksi (Pelabuhan)	100		Survei, pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Pengkutan PIPB	100.000.000		30	Lembar			15			15						
	14. Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Berbasis Internasional (persen)	100	F4LN	Pengelolaan Enkoder Pelautan dan Perikanan (Jasa Lainnya)	0	7.009.185.000	440	Orang	440	440	440	440								
	15. Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Berbasis Internasional (Peningkatan pelaksanaan P4LN PIP-PM Phase-Lender ICB melalui pekerjaan jasa konsultasi PMO dan CMC, kegiatan manajemen proyek, capacity building dan kegiatan pendukung lainnya)	100		Rapat Teknis Pelabuhan Pengkutan PNPB Pascaproduksi	200.000.000		1	Kal												

Jakarta, April 2025
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,
Aty Gandra

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Kepelabuhanan Perikanan menitik beratkan pada 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 4 (empat) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II dalam bentuk dashboard sebagai berikut:



Gambar 2. Dashboard Kinerjaku Triwulan III tahun 2025 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan III tahun 2025 memiliki kategori “Istimewa”, ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **116.47%.**

Pada tahun triwulan III Tahun 2025, dari 19 Indikator Kinerja, terdapat 2 Indikator Kinerja yang dilakukan perhitungan yaitu Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya dan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan TW III 2025

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Capaian TW III 2025	%
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab				

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Capaian TW III 2025	%
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan SKPT yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	90	60	80,71	120
	2. Persentase Pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95			
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	37			
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	4			
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28,5			
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48			
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	16			
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	41			
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	79			
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	78			
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	79			
	12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBK Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai)	90			

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Capaian TW III 2025	%
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	100			
	14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional (persen)	100			
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port (persen)	100			
2.	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan				
	16. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	87			
	17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	85	85	96	112,94
	18. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98,5			
	19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	88			

3.2. Analis Capaian Kinerja

Pada periode tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (SK) 1 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Indikator Kinerja (IK) pada SK 1 yaitu:

1. Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.

2. Persentase Pembangunan pelabuhan perikanan SKPT.
3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan.
4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan.
5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum.
6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan.
7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik.
8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).
9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA).
11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).
12. Tingkat penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan.
13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi.
14. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional.
15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port.

Indikator Kinerja (IK) 1 – Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.

Indikator ini menunjukkan persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Capaian pengembangan dan peningkatan fasilitas di pelabuhan perikanan berupa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyiapan dokumen perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(10%)**
2. Penyiapan dokumen tender/pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(15%)**.
3. Pembahasan dan Penyiapan Dokumen Kontrak Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(20%)**.
4. Penyiapan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(10%)**.
5. Pengendalian pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(30%)**.
6. Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan **(15%)**.

Tabel 3. Capaian IK Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” TW III Tahun 2025

SK 1 Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal											
IK 11 Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)											
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	TW III Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Realisasi thd target TW III	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra
-	8	5,26	5,09	5	90	60	80,71	112,94			

Pada triwulan III tahun 2025, Indikator kinerja Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya telah mencapai 80,70%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyiapan dokumen perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(10%)**.
2. Penyiapan dokumen tender/pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(15%)**.
3. Pembahasan dan penyiapan dokumen kontrak konstruksi Pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan **(20%)**.
4. Penyiapan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan **(10%)**
5. Pengendalian pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(17,143%)**.
6. Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan **(8,571%)**.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa yang anggarannya bersumber dari Hibah Langsung *Japan International Cooperation Agency (JICA)* untuk *Project “The Programme for the Development of Fisheries Sector in Outer Islands*, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada Tahapan Perancangan/Perencanaan Konstruksi, Tahapan Pelaksanaan Konstruksi dan Tahapan Pengawasan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa.
2. Adapun posisi proses pengadaan barang/jasa masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan dan telah berjalan meliputi:
 - a. Tahapan Perancangan/Perencanaan Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa.
 - Proses penetapan dokumen persiapan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa oleh PPK tanggal 30 Oktober 2024.

- Proses pemilihan penyedia melalui Metode Pengadaan Langsung telah dilaksanakan dari tanggal 1 s.d 13 November 2024, dan menetapkan CV. GRIYA PERSADA sebagai pelaksana Jasa Konsultansi Perencanaan Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa, dengan nilai kontrak Rp99.529.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - Proses pelaksanaan kontrak pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan menyelesaikan Dokumen Perencanaan dengan BAST pada tanggal 13 Desember 2024.
 - Pembayaran atas pekerjaan telah dilakukan sesuai hasil reviu Inspektorat Jenderal yang tertuang dalam Surat Inspektur II Nomor R.46/ITJ.2/HP.380/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 dan surat Permohonan pembayaran 80% Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa beserta kelengkapan dokumen pendukung pembayaran.
 - Sisa pembayaran pekerjaan akan dilakukan pada saat selesai tahapan pendampingan tender konstruksi (15%) dan pengawasan konstruksi berkala (5%).
- b. Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa.
- Telah dilakukan reviu Perencanaan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa bersama Tim JICA Consultant sesuai dengan surat Plh. Direktur Kepelabuhanan Perikanan kepada Kepala Biro Perencanaan Nomor B.403/DJPT.4/KU.220/II/2025 tanggal 6 Februari 2025.
 - Proses penetapan dokumen persiapan tender Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa oleh PPK tanggal 28 Februari 2025.
 - Proses pemilihan penyedia melalui Metode Tender telah dilaksanakan dari tanggal 4 s.d 19 Maret 2025, dan menetapkan CV. GOMINA PERMAI sebagai pemenang dan calon pelaksana konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa, dengan nilai penawaran terkoreksi Rp1.987.065.216,26 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu dua ratus enam belas koma dua puluh enam rupiah).
 - Sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, telah dilaksanakan Rapat Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia hari Rabu tanggal 9 April 2025 yang tertuang dalam Berita Acara (BA) Rapat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya melalui Memo Ketua Tim Kerja Pembangunan Pelabuhan Perikanan.
 - Saat ini penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Proses berkontrak kepada calon penyedia masih menunggu sampai dengan adanya penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- c. Tahapan Pengawasan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan

Tiakur SKPT Moa.

- Proses penetapan dokumen persiapan pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur *Seawall* Pelabuhan Perikanan Tiakur SKPT Moa oleh PPK tanggal 13 Maret 2025.
 - Proses pemilihan penyedia melalui Metode Pengadaan Langsung dari tanggal 10 s.d 15 April 2025, dan saat ini sudah pada tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
3. Proses Pembahasan dan penyiapan dokumen kontrak konstruksi Pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan yang telah dilaksanakan dan telah berjalan meliputi:
- a. Perencanaan awal, mengidentifikasi kebutuhan proyek, yang mencakup tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
 - b. Penentuan spesifikasi proyek, dalam penyusunan kontrak detail teknis dan operasional proyek akan dirumuskan secara mendalam hal tersebut mencakup pengembangan desain dan perencanaan yang komprehensif (termasuk Pembuatan gambar teknis, perhitungan struktur dan penentuan material yang akan digunakan bahkan RAB yang disusun berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan, seperti estimasi biaya untuk material, tenaga kerja, alat konstruksi dan kebutuhan lainnya).
 - c. Pemilihan kontraktor, tahapan penyusunan kontrak ini dimulai dengan pengumuman tender untuk menarik minat kontraktor yang memiliki kualifikasi dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan proyek. Proses ini melibatkan penilaian proposal yang diajukan oleh berbagai kontraktor. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria seperti kualitas teknis, biaya, waktu penyelesaian dan pengalaman.
 - d. Penyusunan draft kontrak, untuk merumuskan ketentuan dan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Proses ini meliputi penyusunan dokumen kontrak yang mencakup detail pekerjaan, jadwal pelaksanaan, biaya dan tanggung jawab masing-masing pihak draft kontrak harus merinci ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, metode pembayaran, jaminan dan penalti untuk keterlambatan atau ketidakpatuhan juga harus ditentukan secara jelas.
 - e. Pembahasan dan Negosiasi, mengumpulkan semua pihak yang terlibat untuk meninjau draft kontrak secara mendetail. Diskusi mendalam dilakukan untuk memastikan setiap klausul kontrak dipahami dan disetujui. Selama pembahasan memungkinkan muncul kebutuhan untuk merevisi beberapa ketentuan kontrak, baik terkait ruang lingkup kerja, jadwal pelaksanaan, biaya atau tanggung jawab. Negosiasi bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak dan mencari solusi atas perbedaan pendapat atau konflik yang mungkin timbul. Melalui pembahasan dan negosiasi yang efektif, akan dihasilkan kontrak yang diterima oleh semua pihak dan siap untuk di tandatangi.
 - f. Penandatanganan Kontrak, adalah menandai kesepakatan resmi antara semua pihak.

Tahap penyusunan kontrak ini dilakukan oleh pemilik proyek, kontraktor utama atau subkontraktor. Semua pihak memiliki kewajiban dan hak yang jelas terkait pelaksanaan proyek. Juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk penyelesaian proyek sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

4. Proses Penyiapan dokumen pengadaan jasa konsultansi pengawasan Pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan yang telah dilaksanakan dan telah berjalan meliputi:

Pengawasan Jasa Konsultansi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai dengan rencana, spesifikasi teknis, mutu, waktu, dan biaya yang telah disepakati. Pengawasan ini mencakup pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, serta pengendalian atas seluruh aspek pelaksanaan proyek, baik teknis maupun administratif. Secara keseluruhan, pengawasan jasa konstruksi bukan hanya soal mengamati pekerjaan di lapangan, tetapi merupakan fungsi kontrol dan penjaminan mutu yang sangat krusial demi keberhasilan proyek konstruksi secara menyeluruh. Tahap pengawasan Jasa Kontruksi mulai dari sebelum pekerjaan dimulai hingga proyek diserahkan berikut tahapan-tahapan utama dalam pengawasan jasa konstruksi:

- a. Tahapan persiapan pengawasan, pengawas mempersiapkan segala dokumen dan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk:
 - Menelaah dokumen kontrak, gambar kerja, dan spesifikasi teknis
 - Menyusun rencana kerja pengawasan
 - Menyusun jadwal dan metode pengawasan
 - Melakukan rapat koordinasi awal dengan pihak terkait (owner, kontraktor, perencanaan)
- b. Tahapan pengawasan Awal (*Pre-Construction*), Pengawasan dimulai sejak mobilisasi dan sebelum pekerjaan fisik berlangsung:
 - Verifikasi kesiapan kontraktor (tenaga kerja, alat, dan material)
 - Pemeriksaan dokumen administrasi dan teknis awal
 - Menilai kelayakan lokasi proyek
 - Menyaksikan dan mencatat uji material awal jika diperlukan
- c. Tahapan pengawasan pelaksanaan konstruksi, ini adalah tahap utama di mana pekerjaan fisik berlangsung:
 - Mengawasi metode kerja dan pelaksanaan di lapangan
 - Memastikan pekerjaan sesuai gambar, spesifikasi, dan jadwal
 - Mengontrol kualitas material dan hasil pekerjaan
 - Mencatat setiap progres, hambatan, serta perubahan pekerjaan
 - Melakukan pengujian teknis sesuai kebutuhan
 - Memberikan instruksi lapangan bila ada deviasi

- d. Tahap evaluasi dan pelaporan, Pengawas menyusun laporan rutin yang memuat:
 - Progres pekerjaan secara fisik dan keuangan
 - Dokumentasi deviasi atau penyimpangan
 - Evaluasi mutu dan kinerja kontraktor
 - Rekomendasi teknis atas masalah yang timbul
- e. Tahap pengawasan akhir (*Close-Out*) Tahap akhir dilakukan saat pekerjaan hampir selesai dan menjelang serah terima:
 - Pemeriksaan akhir hasil pekerjaan
 - Verifikasi kesesuaian dengan dokumen kontrak
 - Menyusun daftar pekerjaan yang belum selesai (punch list)
 - Mempersiapkan berita acara serah terima (PHO/FHO)
 - Menyerahkan laporan akhir pengawasan

Dengan memahami dan menerapkan setiap tahapan pengawasan jasa konstruksi secara sistematis, mutu proyek dapat terjaga sesuai standar teknis, waktu dan biaya yang telah direncanakan. Pengawasan yang baik bukan hanya soal kontrol dilapangan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap kualitas dan keberkelanjutan proyek.

5. Proses Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan ada;ah meliputi izin, perencanaan, pelaksanaan teknis, pemantauan, dan pelaporan. Tahapannya dimulai dengan mendapatkan izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diikuti dengan perencanaan yang matang sesuai peraturan, pelaksanaan konstruksi oleh pihak yang bertanggung jawab, pemantauan kualitas dan kesesuaian dengan standar, dan diakhiri dengan pelaporan serta penilaian kinerja lingkungan secara berkala.

Tahapan Proses Pengendalian

- a. **Perizinan:** Mendapatkan izin yang diperlukan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum memulai konstruksi di wilayah daratan.
- b. **Perencanaan:** Penyusunan rencana pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan hidup.
- c. **Pelaksanaan Konstruksi:** Pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan yang terdiri dari fasilitas pokok (dermaga, kolam), fasilitas fungsional (kantor, listrik, air bersih), dan fasilitas penunjang (MCK, pos jaga).
- d. **Pemantauan dan Pengendalian: Melakukan** pemantauan selama proses pembangunan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan standar yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi, termasuk standar lingkungan seperti kebersihan, pengelolaan sampah, dan limbah, menjadi fokus utama.
- e. **Pelaporan:** Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan dan pencapaian standar

yang telah ditetapkan. Sistem informasi seperti SELARASKAN dapat digunakan untuk memantau dan melaporkan tata kelola lingkungan secara berkala.

Aspek yang dikendalikan :

- Kepatuhan terhadap peraturan:
Memastikan seluruh pembangunan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait kepelabuhanan dan lingkungan.
- Kualitas fasilitas:
Memastikan fasilitas yang dibangun memiliki kualitas yang baik dan berfungsi sesuai peruntukannya.
- Aspek lingkungan:
Mengendalikan dampak lingkungan dari pembangunan dan operasional pelabuhan.
- Kinerja SDM:
Memastikan kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.

6. Proses Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan : meliputi pemantauan progres fisik dan non-fisik, seperti kesiapan fasilitas (dermaga, kantor, listrik) dan kesiapan sumber daya manusia (petugas dan nelayan). Proses ini melibatkan inspeksi berkala, dialog dengan pemangku kepentingan, serta verifikasi kelengkapan dokumen dan persyaratan teknis lainnya untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Tahapan umum proses monitoring dan evaluasi

- a. Perencanaan dan Penentuan Indikator:
Menentukan indikator keberhasilan proyek, seperti target penyelesaian fisik (misalnya, progres pembangunan dermaga) dan pencapaian kualitas, serta menyiapkan rencana monitoring yang detail.
- b. Pelaksanaan Monitoring Lapangan:
Tim pengawas melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek untuk melihat secara visual progres pekerjaan fisik dan memverifikasi kondisi fasilitas yang ada, termasuk membandingkannya dengan desain dan rencana kerja.
- c. Pengumpulan dan Verifikasi Data:
Mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti laporan kemajuan dari kontraktor, dokumentasi foto, dan hasil inspeksi lapangan. Data ini kemudian diverifikasi untuk memastikan keakuratannya.
- d. Evaluasi dan Analisis:
Mengevaluasi data yang terkumpul untuk mengidentifikasi kendala, penyimpangan dari rencana, dan risiko yang mungkin timbul. Analisis ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas biaya, waktu, dan sumber daya yang digunakan.

- e. Dialog dengan Pemangku Kepentingan:
Mengadakan pertemuan rutin dengan semua pihak terkait, termasuk kontraktor, pengawas, dan pemerintah daerah (seperti Dinas Kelautan dan Perikanan), untuk membahas temuan, kendala, dan solusi yang dapat diambil.
- f. Pelaporan:
Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Laporan ini berisi temuan, analisis, rekomendasi perbaikan, dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah yang ada.
- g. Tindak Lanjut dan Perbaikan:
Berdasarkan rekomendasi dalam laporan, tindakan perbaikan dilakukan untuk memastikan proyek tetap berada di jalur yang benar dan sesuai dengan tujuan awal.

Indikator Kinerja (IK) 2 – Persentase Pembangunan SKPT

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase progres pembangunan pelabuhan perikanan le Meule SKPT Sabang guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Jumlah capaian progress pembangunan pelabuhan perikanan SKPT meliputi:

1. Penyiapan dokumen lelang pembangunan SKPT
2. Penandatanganan kontrak
3. Pembahasan dan koordinasi pelaksanaan konstruksi
4. Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan konstruksi
5. Serah Terima Pekerjaan

Pada Triwulan III ini dapat dilaporkan bahwa dilakukan **Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi**. adalah proses memantau, mengawasi, dan mengelola proyek untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi, jadwal, anggaran, dan kualitas yang telah disepakati. Ini melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk penyusunan gambar kerja, rapat koordinasi, pemantauan lapangan, pemeriksaan peralatan, dan memastikan kepatuhan pada standar keselamatan kerja, seperti menggunakan APD, mengidentifikasi risiko, dan mematuhi prosedur.

Tahapan utama

- **Penyusunan dokumen:** Mulai dari penyusunan gambar kerja hingga rencana inspeksi dan pengujian.
- **Persiapan pekerjaan:** Mobilisasi tenaga kerja dan peralatan, serta memahami dokumen proyek secara menyeluruh.
- **Koordinasi:** Melakukan rapat perencanaan dan koordinasi secara rutin antar tim terkait.
- **Pemantauan:** Melakukan peninjauan lapangan, memantau kemajuan pekerjaan, dan mengawasi pengukuran.

Aspek penting

- **Keselamatan:**
Memastikan kepatuhan pada peraturan keselamatan kerja, menggunakan alat pelindung diri (APD), dan mengidentifikasi risiko.
- **Kualitas:**
Mengendalikan mutu agar sesuai dengan standar yang ditetapkan melalui serangkaian proses yang dirancang untuk mengawasi semua aspek proyek.
- **Manajemen kontrak:**
Mengelola kontrak secara efektif, termasuk mekanisme penanganan perubahan dan penyelesaian sengketa.
- **Pengendalian:**
Mengawasi dan mengelola pelaksanaan kontrak untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi, termasuk lingkup pekerjaan, jadwal, biaya, dan kualitas.

Manfaat Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi:

- **Meminimalisir kegagalan:**
Mengendalikan mutu melalui dokumen seperti RMK (Rencana Mutu Konstruksi) untuk mencegah kegagalan proyek.
- **Menyelesaikan proyek:**
Memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar yang disepakati.

Dapat disampaikan pada Triwulan III **Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi** pada Progres Minggu ke 69 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Le Meulee SKPT Sabang sebagai berikut:

Kontrak tanggal 30 Mei 2024, SPMK tanggal 5 Juni 2024 (Rp.65.384.000.000)

Lama pelaksanaan 365 hari (5 Juni 2024 sd 4 Juni 2025).

Kontrak Add II tanggal 26 Mei 2025, nilai kontrak menjadi (Rp.71.332.000.000,00)

Kontrak Add III tanggal 29 Agustus 2025, nilai kontrak menjadi (Rp.71.344.000.000,00)

Kontrak Add IV tanggal 01 September 2025, nilai kontrak menjadi (Rp.71.344.000.000,00)

Lama pelaksanaan menjadi 545 hari (5 Juni 2024 sd 01 Desember 2025)

*) ADD-01-MC.0 (30 Juli 2024)

*) ADD-02 (26 Mei 2025)

*) Re Schedule pada Priode Minggu ke- 37 (12 Februari 2025)

*) Re Schedule Addendum 4 Pada Periode Minggu ke- 65 (29 Agustus 2025)

*) Re Schedule Penambahan Waktu Bangunan Laut Pada Periode Minggu ke-66 (01 September 2025)

Minggu ke- 69

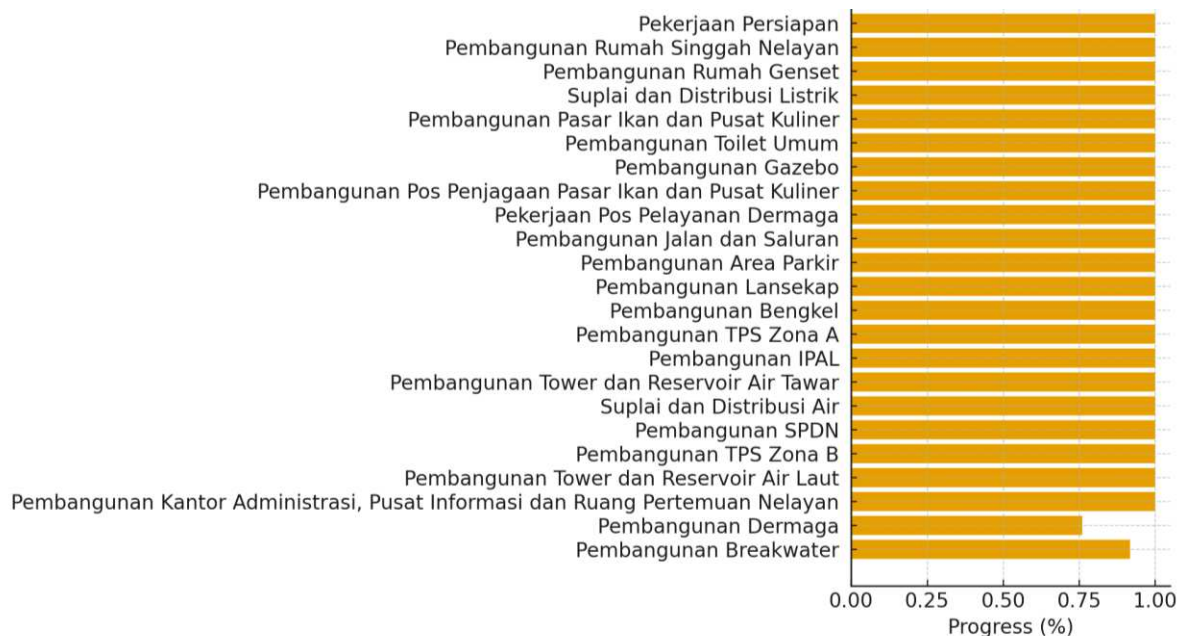
(22 September 2025 s.d 28 September 2025)

Rencana : 94,085%

Realisasi : 94,103%

Deviasi : 0,018%

Rencana	Progres Per Bangunan
Rencana Kerja:	1. Pekerjaan Persiapan (100%)
1. Melanjutkan Pekerjaan Persiapan	2. Pembangunan Rumah Singgah Nelayan (100%)
2. Melanjutkan Pekerjaan Pasar Ikan dan Pasar Kuliner	3. Pembangunan Rumah Genset (100%)
3. Melanjutkan Pekerjaan Rumah Genset	4. Suplai dan Distribusi Listrik (100%)
4. Melanjutkan Pekerjaan Gedung ADM	5. Pembangunan Pasar Ikan dan Pusat Kuliner (100%)
5. Melanjutkan Tower dan Reservoir Air Tawar	6. Pembangunan Toilet Umum (100%)
6. Melanjutkan Tower dan Reservoir Air Laut	7. Pembangunan Gazebo (100%)
7. Melanjutkan Pekerjaan Rumah Singgah Nelayan	8. Pembangunan Pos Penjagaan Pasar Ikan dan Pusat Kuliner (100%)
8. Melanjutkan Pekerjaan Breakwater	9. Pekerjaan Pos Pelayanan Dermaga (100%)
9. Melanjutkan Pekerjaan Dermaga	10. Pembangunan Jalan dan Saluran (100%)
10. Melanjutkan Jalan dan Saluran	11. Pembangunan Area Parkir (100%)
11. Melanjutkan Pekerjaan Area Parkir	12. Pembangunan Lansekap (100%)
12. Melanjutkan Pekerjaan Lansekap	13. Pembangunan Bengkel (100%)
13. Melanjutkan Pekerjaan SPDN	14. Pembangunan TPS Zona A (100%)
14. Melanjutkan Pekerjaan Suplai dan Distribusi Air	15. Pembangunan IPAL (100%)
15. Melanjutkan Pekerjaan Suplai dan Distribusi Listrik	16. Pembangunan Tower dan Reservoir Air Tawar (100%)
16. Melanjutkan Pekerjaan Gazebo	17. Suplai dan Distribusi Air (100%)
17. Melanjutkan Pekerjaan Toilet Umum	18. Pembangunan SPDN (100%)
18. Melanjutkan Pekerjaan Pos Pelayanan Dermaga	19. Pembangunan TPS Zona B (100%)
19. Melanjutkan Pekerjaan IPAL	20. Pembangunan Tower dan Reservoir Air Laut (100%)
20. Melanjutkan Pekerjaan Persiapan	21. Pembangunan Kantor Administrasi, Pusat Informasi dan Ruang Pertemuan Nelayan (100%)
21. Melanjutkan Pekerjaan Bengkel	22. Pembangunan Dermaga (76,12%)
22. Melanjutkan Pekerjaan Rumah Genset	23. Pembangunan Breakwater (91,89%)
23. Melanjutkan Pekerjaan TPS Zona B	



Permasalahan:

- Pekerjaan *Breakwater* belum ada aktifitas karena permasalahan antara kontraktor dengan supplier batu boulder belum terselesaikan
- Pekerjaan pemasangan *Trestle* Dermaga belum dikerjakan.

Tindak Lanjut:

- Segera selesaikan permasalahan dengan pihak *supplier*
- Segera melakukan pekerjaan pemasangan *Trestle* Dermaga

Telah dilakukan Serah Terima Pertama Sebagian (PHO Sebagian) pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Bangunan Darat pada rincian Pembangunan sebagai berikut:

- Surat Kontraktor Pelaksana (PT. Tri Karya Utama Cendana – PT. Putra Nanggroe Aceh, KSO) Nomor: 52/SP/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Permohonan PHO Parial Bangunan Darat.
- Surat Konsultan Pengawas (PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero)) Nomor: 08.29/SP/APN/VIII/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Serah Terima Pertama Sebagian (PHO Sebagian) pada: 1) Pembangunan Rumah Genset; 2) Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Zona B.; 3) Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Zona A; 4) Pembangunan Pos Penjagaan Pasar Ikan dan Pusat Kuliner; dan 5) Pembangunan Pos Pelayanan Dermaga.
- Surat Konsultan Pengawas (PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero)) Nomor: 08.30/SP/APN/VIII/2025 Tanggal 30 Agustus 2025 Perihal Serah Terima Pertama Sebagian (PHO Sebagian) pada: 1) Pekerjaan Tower dan Reservoir Air Tawar; 2) Pekerjaan *Solar*

Packed Dealer untuk nelayan (SPDN); 3) Pekerjaan Rumah Singgah Nelayan; 4) Pekerjaan Gazebo; dan 5) Pekerjaan Toilet Umum.

- d. Surat Konsultan Pengawas (PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero)) Nomor: 08.31/SP/APN/VIII/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Serah Terima Pertama Sebagian (PHO Sebagian) pada: 1) Pembangunan Pasar Ikan dan Pusat Kuliner; 2) Pembangunan Tower dan Reservoir Air Laut; 3) Pembangunan Lanskap; 4) Pembangunan Kantor Administrasi, Pusat Informasi dan Ruang Pertemuan Nelayan dan 5) Pekerjaan Persiapan.
- e. Surat Konsultan Pengawas (PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero)) Nomor: 09.01/SP/APN/IX/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Serah Terima Pertama Sebagian (PHO Sebagian) pada: 1) Pembangunan IPAL; 2) Pembangunan Suplai dan Distribusi Air Bersih; 3) Pembangunan Suplai dan Distribusi Listrik; 4) Pembangunan Parkiran; 5) Pembangunan Jalan dan Saluran dan 6) Pembangunan Bengkel.

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan rencana pembangunan dan/atau pengembangannya. Identifikasi pelabuhan perikanan meliputi:

- a. Analisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan perikanan.
- b. Pembahasan dan koordinasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Cara penghitungannya adalah Jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan pembangunan dan/atau **(Rppa)** pengembangannya dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (**Rrippn**).

Indikator Kinerja Lokasi pelabuhan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Hingga Triwulan III tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan reviu Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) dengan pembahasan terkait usulan lokasi baru pelabuhan perikanan. Pembahasan tersebut telah dilaksanakan di 12 (dua belas) Provinsi sebagai berikut:

1. Provinsi Jawa Barat
Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN **tidak ada perubahan** baik jumlah maupun nama Pelabuhan Perikanan di Provinsi Jawa Barat.
2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN **tidak ada perubahan** baik jumlah maupun nama Pelabuhan Perikanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Provinsi Jawa Tengah
Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang RIPPN untuk Provinsi Jawa Tengah, dari total 52 Pelabuhan Perikanan terdapat **23 Pelabuhan Perikanan yang diusulkan di hapus** dalam RIPPN dan **4 Pelabuhan Perikanan yang berganti nama**. Perlu dilakukan **reviu lokasi Pelabuhan Pangkalan** yang tercantum pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan. Lokasi yang perlu direviu antaranya Logending, Pulolampes, Wonokerto, Tawang, Karimunjawa dan Tanjungsari.
4. Provinsi Sumatera Selatan
Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN Provinsi Sumatera Selatan **mengusulkan 4 pelabuhan perikanan** untuk mendukung perikanan laut yaitu PPI Tanjung Carat (usulan baru), PPI Jakabaring, PPI Sungai Lumpur, dan PPI Sungsang. Sedangkan untuk **perikanan perairan darat**, Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan **PPI Pedamaran**.
5. Provinsi DKI Jakarta
Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN **tidak ada perubahan** baik jumlah maupun nama Pelabuhan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta.
6. Provinsi Sulawesi Barat
Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN Provinsi Sulawesi Barat **mengusulkan 8 pelabuhan perikanan** untuk mendukung

perikanan laut yaitu PP Lantora, PPI Palipi, PP Banggae, PP Kasiwa, CP Babana, CP Pasangkayu, CP Galetto Balanipa (Usulan baru), CP Bambaloka (Usulan Baru), dan **1 pelabuhan perikanan yang dihapus** yaitu CP Rangas Mamuju

7. Provinsi Papua Barat Daya

Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN, Provinsi Papua Barat Daya **mengusulkan 7 pelabuhan perikanan** terdiri dari **6 pelabuhan perikanan** yang dibangun oleh pemerintah pusat/kabupaten yaitu PPP Sorong, PP Klademak, PP Katapop, CP Wersar, CP Womom dan CP Snonbukor (Usulan baru) dan **1 pelabuhan perikanan swasta** yaitu CP Citraraja Ampat, dan **1 pelabuhan perikanan yang dihapus** yaitu CP Waringkris

8. Provinsi Papua Tengah

Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN, **tidak ada perubahan** baik jumlah maupun nama Pelabuhan Perikanan di Provinsi Papua Tengah

9. Provinsi Papua

Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN, Provinsi Papua **mengusulkan 10 pelabuhan perikanan** yang terdiri dari **7 pelabuhan** wilayah laut yang dibangun pemerintah pusat/kabupaten, **1 pelabuhan perikanan** untuk perairan darat dan **2 pelabuhan swasta**

10. Provinsi Papua Barat

Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN, **tidak ada perubahan** baik jumlah maupun nama Pelabuhan Perikanan di Provinsi Papua Barat

11. Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN untuk Provinsi Sulawesi Selatan, dari total 48 Pelabuhan Perikanan terdapat **23 Pelabuhan Perikanan yang diusulkan dihapus** dan **1 pelabuhan usulan baru yaitu CP Kaili**.

12. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil penyandingan data dan verifikasi data usulan lokasi Pelabuhan Perikanan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 tahun 2023 tentang Perubahan

atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 109 tahun 2021 tentang RIPPN untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat **mengusulkan 6 pelabuhan perikanan** yaitu: PP Teluk Awang, PPP Labuhan Lombok, PPI Tanjung Luar, PP Sape, PP Soroadu dan PPI Teluk Santong dan **1 pelabuhan perikanan** yang dihapus yaitu PP Soro Kempo.

Indikator Kinerja (IK) 4 – Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan.

Indikator ini menunjukkan tersedianya dokumen rencana dan konsep pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. Jumlah dokumen perencanaan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan meliputi dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan diantaranya studi kelayakan, dokumen lingkungan, KKRL, WKOPP, masterplan dan DED.

Indikator Kinerja Lokasi rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Pencapaian indikator kinerja rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan belum terlaksana, dikarenakan masih menunggu proses pembukaan blokir anggaran.

Indikator Kinerja (IK) 5 – Persentase pelabuhan dengan tingkat operasional optimum

Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum dihitung berdasarkan capaian tingkat operasional pelabuhan perikanan dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tercantum dalam RIPPN. Pelabuhan Perikanan dengan tingkat operasional optimum dilihat dari beberapa aspek meliputi:

- a. Fasilitas minimal pelabuhan perikanan.
- b. Kriteria teknis.
- c. Kriteria operasional.
- d. Kelembagaan.
- e. Sumber Daya Manusia.
- f. Anggaran Operasional.

Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kelas pelabuhan perikanan.

Tidak ada penetapan kelas pelabuhan perikanan pada periode triwulan III tahun 2025.

2. Kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan melalui penilaian SELARASKAN pada triwulan III terdapat 3 (tiga) pelabuhan yang memiliki skor tertinggi dalam menerapkan pengelolaan lingkungan yaitu PPN Sibolga, PPS Cilacap, dan PPN Prigi.

Capaian implementasi SELARASKAN bulan Juli s.d September 2025 yang dievaluasi pada bulan Oktober 2025 dengan skor setelah koreksi *evidence* oleh Tim Evaluasi SELARASKAN sebagai berikut:

No.	Pelabuhan Perikanan	Juli	Agustus	September	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
1.	PPN Sibolga	97,03	96,82	95,26	289,11	96,37	SANGAT BAIK
2.	PPS Cilacap	93,26	93,08	97,65	283,99	94,66	SANGAT BAIK
3.	PPN Prigi	96,88	93,44	92,80	283,12	94,37	SANGAT BAIK
4.	PPN Kejawan	94,60	93,25	91,03	278,88	92,96	SANGAT BAIK
5.	PPS Bungus	92,08	90,01	92,38	274,48	91,49	SANGAT BAIK
6.	PPN Pemangkat	90,86	91,79	91,36	274,01	91,34	SANGAT BAIK
7.	PPN Tanjung Pandan	89,90	92,59	91,27	273,76	91,25	SANGAT BAIK
8.	PPP Teluk Batang	92,46	91,17	89,83	273,46	91,15	SANGAT BAIK
9.	PPN Ternate	88,18	94,08	89,93	272,20	90,73	SANGAT BAIK
10.	PPS Bitung	95,55	91,64	83,47	270,66	90,22	SANGAT BAIK
11.	PPN Brondong	90,84	89,89	88,35	269,08	89,69	SANGAT BAIK
12.	PPN Palabuhanratu	83,04	92,07	90,20	265,31	88,44	SANGAT BAIK

No.	Pelabuhan Perikanan	Juli	Agustus	September	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
13.	PPN Pengambengan	91,84	85,99	87,19	265,02	88,34	SANGAT BAIK
14.	PPN Tual	86,62	85,08	89,13	260,83	86,94	SANGAT BAIK
15.	PPS Belawan	87,57	86,40	84,43	258,41	86,14	SANGAT BAIK
16.	PPN Ambon	82,06	81,62	91,84	255,51	85,17	SANGAT BAIK
17.	PPS Nizam Zachman Jakarta	84,18	81,78	86,52	252,48	84,16	SANGAT BAIK
18.	PPS Kendari	78,05	84,33	88,06	250,44	83,48	SANGAT BAIK
19.	PPN Karangantu	90,66	71,73	85,02	247,41	82,47	SANGAT BAIK
20.	PPN Sungailiat	80,90	81,89	84,25	247,04	82,35	SANGAT BAIK
21.	PPN Pekalongan	82,89	83,02	80,55	246,46	82,15	SANGAT BAIK
22.	PPN Kwandang	67,59	64,34	81,57	213,50	71,167	BAIK

3. Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional di Pelabuhan Perikanan.

Telah dilaksanakan kegiatan workshop pendahuluan penyusunan dokumen Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas Pelabuhan Perikanan pada tanggal 22 s.d 25 Juli 2025 di Raiser Cibinong Bogor yang dihadiri oleh 5 (lima) Auditor Internal Sisfamobvitnas UPT Pelabuhan Perikanan Pusat dan Tenaga Ahli Manajemen Pengamanan;

Penyusunan dokumen Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas bertujuan:

- menyediakan pedoman dan standar sebagai acuan dalam manajemen keamanan di Pelabuhan Perikanan;
- meminimalisir ancaman, kerentanan, dan dampak risiko melalui upaya mitigasi dan pengendalian risiko keamanan di Pelabuhan Perikanan;
- menjamin keamanan dan kelancaran operasional Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka tindak lanjut penetapan KEPMEN KP Nomor 47 tahun 2025 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan sebagai Objek Vital Nasional telah dilaksanakan

kunjungan dan audiensi bersama Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit), Korps Sabhara Baharkam Polri pada tanggal 28 Agustus 2025 di Mako Korps Sabhara Kelapa Dua, Depok. Hasil kunjungan dan audiensi kami laporkan sebagai berikut:

1. Direktur Pamobvit, Korps Sabhara Baharkam Polri menyampaikan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti pasca penetapan Obvitnas sebagai berikut:
 - a. Pemasangan papan nama penetapan Obvitnas di 7 (tujuh) lokasi Pelabuhan Perikanan Obvitnas, yaitu: 1) PPS Nizam Zachman 2) PPS Bitung 3) PPS Cilacap, 4) PPN Pengambengan, 5) PPN Kejawanan, 6) PPN Ambon dan 7) PPN Tual;
 - b. Penyusunan Perjanjian Kerja Teknis (PKT) antara pengelola pelabuhan perikanan (Direktur Kepelabuhanan Perikanan atau Kepala Pelabuhan Perikanan dengan Direktur Pamobvit, Polri) dalam hal bantuan pengamanan Obvitnas. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan merencanakan rapat penyusunan PKT akan segera dimulai pada awal September;
 - c. Simultan dengan proses penyusunan PKT dapat dilaksanakan kegiatan Pra Pendampingan Teknis (Bintek) untuk penilaian awal kesiapan pelabuhan Perikanan dalam pelaksanaan Bintek;
 - d. Pasca PKT terbit akan dilanjutkan dengan Pelaksanaan Bintek yang melibatkan auditor Dit Pamobvit dan auditor profesional;
 - e. Pasca pelaksanaan kegiatan Bintek, Pelabuhan Perikanan perlu melaksanakan tindakan perbaikan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas. Pada tindakan perbaikan ini perlu didukung dengan anggaran yang memadai khususnya apabila terdapat kebutuhan pembangunan atau penyediaan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pengamanan; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
 - f. Apabila pelabuhan perikanan telah selesai melaksanakan tindakan perbaikan dalam Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dan telah siap akan dilakukan Sertifikasi SMP oleh Dit Pamobvit, Polri.
2. Beberapa langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dalam menyiapkan Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas sebagai berikut:
 - a. Pelatihan 7 Orang Auditor Internal SMP pada tanggal 9-23 Mei 2025 yang terdiri dari: 1) 1 auditor PPS Nizam Zachman, 2) 1 auditor PPS Cilacap, 3) 1 auditor PPS Bitung, 4) 1 auditor PPN Kejawanan, 5) 1 auditor PPN Pengambengan dan 6) 2 auditor Dit. Kepelabuhanan Perikanan
 - b. Sosialisasi dan FGD Sistem Manajemen Pengamanan pada tanggal 25 Juni 2025 kepada seluruh UPT Pelabuhan Perikanan;
 - c. Pembahasan dokumen SMP, Risiko Pengamanan, dan Zonasi Pengamanan pada tanggal 20-25 Juli 2025 dengan output berupa template dokumen SMP Obvitnas PP yang masih terus disempurnakan pada dokumen level 3 dan level 4;

- d. Sosialisasi dan Penyusunan Zona Pengamanan Obvitnas di PPN Kejawanan serta penyusunan rancangan MoU antara KKP dan Polri pada tanggal 19-22 Agustus 2025; dan
- e. Inisiasi Perjanjian Kerjasama PPS Nizam Zachman dengan PT. Perikanan Indonesia (PT. Perindo) dalam penataan kawasan PPS Nizam Zachman sebagai salah satu lokasi Obvitnas. Draft PKS telah selesai dibahas bersama dan saat ini masih menunggu proses telaahan final dari Biro Perencanaan.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (2025)																Keterangan												
		Mei				Juni				Juli				Agustus					September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Identifikasi dan pemetaan pelabuhan perikanan calon lokasi Obvitnas																												Selesai	
2	Audiensi penyusunan rencana penetapan pelabuhan perikanan sebagai Obvitnas dengan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit), Korps Sabhara Baharkam Polri																												Selesai dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2025	
3	Pelatihan untuk Calon Auditor Internal dalam rangka Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan																												Selesai dilaksanakan pada tanggal 15-23 Mei 2025	
4	Self Assessment 5 Pelabuhan Perikanan terkait dengan elemen dan kriteria penilaian SMP obvitnas																												Selesai dilaksanakan di masing-masing Pelabuhan PPS Nizam Zahman, PPS Cilacap dan PPS Bitung PPN Kejawanan dan PPN Pengambangan	
5	Sosialisasi tentang pengaturan Objek Vital Nasional kepada Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat																												Selesai dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025	
6	Penyusunan rancangan manual SMP dan rancangan dan penetapan Permen KP tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan																												Selesai dilaksanakan pada tanggal 08-10 Juli 2025	
7	Penerbitan KEPMEN KP tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan sebagai Objek Vital Nasional																												KEPMEN KP Nomor 47 tahun 2025 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan sebagai Objek Vital Nasional pada tanggal 15 Agustus 2025	
8	Sosialisasi tentang KEPMEN KP tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan sebagai Objek Vital Nasional																												Sosialisasi dan Penyusunan Zona Pengamanan Obvitnas di PPN Kejawanan pada tanggal 19-22 Agustus 2025	
9	Audiensi penyusunan Penyusunan PKT antara pengelola Pelabuhan Perikanan dengan Kakorshabara Baharkam Polri dan Dirpamobvit Mabes Polri																												Audiensi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 dan akan dilanjutkan dengan rapat penyusunan PKT	
10	Pra Bintek SMP (Supervisi, Asistensi dan Verifikasi) kepada percontohan Obvitnas Pelabuhan Perikanan UPT Pusat																												On schedule	
11	Bintek SMP (Supervisi, Asistensi dan Verifikasi) kepada percontohan Obvitnas Pelabuhan Perikanan UPT Pusat																												On schedule	
12	Tindakan perbaikan hasil Bintek (auditor internal)																												On schedule	
13	Audit dan sertifikasi SMP Obvitnas																												On schedule	

Selain itu, telah dilaksanakan juga kunjungan lapangan pada lokasi Obvitnas PPS Nizam Zachman Jakarta yang dihadiri oleh Kasubdit Audit Sispamobit, Kepala PPS Nizam Zachman, Auditor Utama - Inspektorat II. Hasil koordinasi bahwa aset yang ada di kawasan PPS Nizam Zachman adalah sebagian besar adalah milik PT. Perindo, sehingga perlu diusulkan untuk menetapkan PT. Perindo juga sebagai Obvitnas. Penyusunan Pedoman Kerjasama Teknis (PKT) telah disepakati antara Direktorat Kepelabuhanan dan Direktorat Pamobvit yang selanjutnya akan ditandatangani oleh kedua pihak.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan

Tingkat pelayanan Perusahaan Pelabuhan Perikanan merupakan lama waktu pelayanan pada jasa Kepelabuhan Perikanan (JKP) dan pelayanan pengendalian lingkungan (JPL) di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat sebanyak 22 Pelabuhan Perikanan.

Ada dua pelayanan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja ini, yaitu:

- a. Pelayanan penerbitan pendaftaran rekomendasi calon pembangun dan pengelola SPDN/SPBUN
- b. Pelayanan penerbitan sertifikat Bimtek CPIB di Pelabuhan Perikanan

Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana pada triwulan III tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- **Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Rekomendasi Calon Pembangun dan Pengelola SPDN/SPBUN**

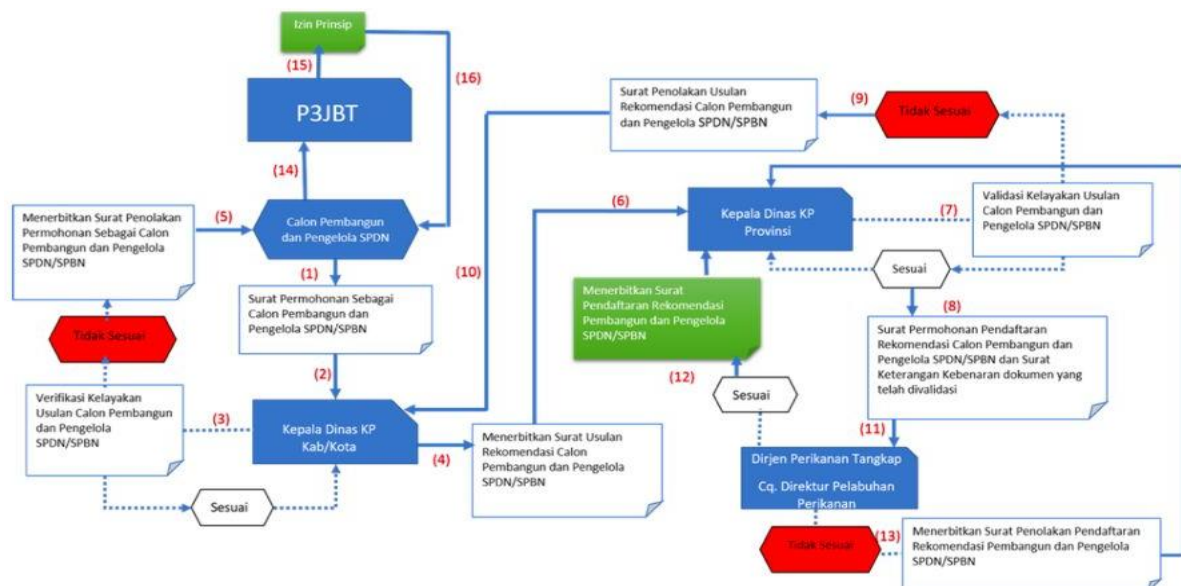
Sampai dengan triwulan III Tahun 2025, telah terbit sebanyak 10 surat pendaftaran rekomendasi pembangun dan pengelola SPBUN pada 7 Provinsi. Dalam proses permohonan pendaftaran terdapat banyak kendala dalam pemenuhan persyaratannya. Dari total 42 permohonan, hanya 10 permohonan yang mendapatkan surat tanggapan calon pembangun dan pengelola SPBUN, sebagai berikut:

1. PT. Jateng Petro Energi di Kab. Kendal Nomor: B.787/DJPT/PI.320/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025;
2. PT. Jar Energy Terbarukan di Kab. Sukabumi Nomor: B.919/DJPT/PI.310/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025;
3. PT. Mahakam Gerbang Raja Migas di Kab. Kutai Kertanegara Nomor: B.970/DJPT/PI.310/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025;
4. Koperasi Nelayan Berkat Jaya di Kab. Batu Bara Nomor: B.984/DJPT/PI.310/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025;
5. PT. Kokoh Abadi Marine di Kota Sibolga Nomor: B.982/DJPT/PI.310/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025;
6. PT. Airlangga Amany Petro di Kab. Morowali Nomor: B.983/DJPT/PI.310/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025;
7. PT. Jar Energy Terbarukan di Kab. Garut Nomor: B.1104/DJPT/PI.310/IX/2025 tanggal 15 September 2025;
8. CV. Dewa Laut Pamayangsari di Kab. Tasikmalaya Nomor: B.1103/DJPT/PI.310/IX/2025 tanggal 15 September 2025;
9. PT. Kedung Karang Indah di Kab. Lamongan Nomor: B.1105/DJPT/PI.310/IX/2025 tanggal 15 September 2025;

10. PT. Samudera Kedung Karang di Kab. Lamongan Nomor: B.1106/DJPT/PI.310/IX/2025 tanggal 15 September 2025.

Untuk mengatasi hal ini, telah dilaksanakan rapat pembahasan permohonan pendaftaran calon pembangun dan pengelola SPBUN bersama dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara.

Mekanisme penerbitan pendaftaran rekomendasi calon pembangun dan pengelola SPDN/SPBUN yaitu sebagai berikut:



Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu yang selanjutnya di P3JBT adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan secara resmi oleh Badan Pengatur Hilih (BPH) Migas.

Persyaratan permohonan pendaftaran rekomendasi calon pembangun dan pengelola SPDN/SPBN adalah sebagai berikut:

1. Identitas Perusahaan (foto copy Akta Pendirian, NPWP, SIUP, TDP, KTP Direktur Perusahaan);
2. Persyaratan dari salah satu P3JBT yang digunakan;
3. Data calon konsumen dan kebutuhan BBM;
4. Fotokopi dokumen status kepemilikan tanah/sewa tanah;
5. Gambar denah posisi Lokasi dan titik koordinat berada di UPT Pusat Pelabuhan Perikanan/UPT Daerah Pelabuhan Perikanan/Sentra Nelayan/Sentra Pembudi Daya Ikan/Sentra Petambak Garam;

6. Pakta Integritas Penanggung Jawab Calon Pengelola yang dibubuhi materai dan cap Perusahaan; dan
7. Asli surat permohonan pendaftaran rekomendasi calon pembangun dan pengelola dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

- **Pelayanan penerbitan sertifikat Bimtek CPIB di Pelabuhan Perikanan**

Dasar Hukum pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan meliputi:

- a. PERMEN KP No. 8 Tahun 2024 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan:
 - pasal 6 ayat (1) huruf b, bahwa direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan perikanan tangkap menjabat sebagai **manajer puncak** dalam susunan organisasi otoritas kompeten;
 - pasal 7 ayat (3), bahwa **Manajer teknis** pada manajer puncak bidang pengelolaan perikanan tangkap terdiri atas:
 - unit kerja yang menyelenggarakan tugas di **bidang kepelabuhanan perikanan**, lebih lanjut pada pasal 8 ayat (2) huruf a dimandatkan melakukan Pembinaan Mutu terhadap penerapan **cara penanganan ikan yang baik**; dan
 - unit kerja yang menyelenggarakan tugas di **bidang kapal dan alat penangkapan ikan**, lebih lanjut pada pasal 8 ayat (2) huruf b dimandatkan melakukan Pembinaan Mutu terhadap **cara penanganan ikan yang baik** berdasarkan program manajemen mutu terpadu/hazard analysis and critical control point **di atas kapal**
- b. PERMEN KP No. 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,
 - pasal 3 ayat (1), dalam rangka mendapatkan sertifikat cara penanganan ikan yang baik dilakukan **pembinaan kepada pelaku usaha** oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pasal 3 ayat (2), pembinaan berupa:
 - sosialisasi
 - **bimbingan teknis**;
 - fasilitasi; dan/atau
 - pemeriksaan lapangan
 - pasal 3 ayat (3), **hasil pembinaan** yang dilakukan oleh Ditjen Perikanan Tangkap berupa Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (**SKKP**)

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebagai manajer teknis melakukan pembinaan mutu terhadap penerapan cara penanganan ikan yang baik dengan menyiapkan:

a. **petugas pembina CPIB** untuk melaksanakan Bimtek CPIB kepada Nelayan sebanyak

- 123 petugas pembina CPIB yang terdiri dari 90 petugas di PP UPT Pusat dan 27 PP UPTD serta 6 petugas di PP Perintis;
- Petugas Pembina CPIB tersebar di 48 pelabuhan perikanan (22 PP Pusat, 22 PP UPTD dan 4 PP Perintis)

SEBARAN PETUGAS PEMBINA CPIB PP UPT PUSAT, DAERAH DAN PERINTIS			
No. Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pembina CPIB	Pengelola	Jumlah PP
1 PPN Pengambangan	6	UPT Pusat	22
2 PPS Belawan	6	UPT Pusat	
3 PPN Brondong	5	UPT Pusat	
4 PPN Kejawanan	5	UPT Pusat	
5 PPN Pekalongan	5	UPT Pusat	
6 PPS Bitung	5	UPT Pusat	
7 PPS Cilacap	5	UPT Pusat	
8 PPS Nizam Zachman	5	UPT Pusat	
9 PPN Karangantu	4	UPT Pusat	
10 PPN Palabuhanratu	4	UPT Pusat	
11 PPN Prigi	4	UPT Pusat	
12 PPN Sibolga	4	UPT Pusat	
13 PPN Tanjungpandan	4	UPT Pusat	
14 PPN Ternate	4	UPT Pusat	
15 PPS Kendari	4	UPT Pusat	
16 PPN Ambon	3	UPT Pusat	
17 PPN Kwardang	3	UPT Pusat	
18 PPN Pemangkat	3	UPT Pusat	
19 PPN Sungailiat	3	UPT Pusat	
20 PPN Tual	3	UPT Pusat	
21 PPS Bungus	3	UPT Pusat	
22 PPP Teluk Batang	2	UPT Pusat	
No. Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pembina CPIB	Pengelola	Jumlah PP
23 PP Tenau	2	UPT Daerah	22
24 PPP Dobo	2	UPT Daerah	
25 PPP Labuhan Lombok	2	UPT Daerah	
26 PPP Pondok Dadap	2	UPT Daerah	
27 PPP Tasik Agung	2	UPT Daerah	
28 PP Amagapati	1	UPT Daerah	
29 PP Karangsong	1	UPT Daerah	
30 PP Kluwut	1	UPT Daerah	
31 PP Oeba	1	UPT Daerah	
32 PPI Gentuma	1	UPT Daerah	
33 PPI Larangan	1	UPT Daerah	
34 PPI Muara Kintap	1	UPT Daerah	
35 PPI Tenda	1	UPT Daerah	
36 PPN Muara Angke	1	UPT Daerah	
37 PPP Bajomulyo	1	UPT Daerah	
38 PPP Bulu	1	UPT Daerah	
39 PPP Kidang Lor	1	UPT Daerah	
40 PPP Labuhan Maringgai	1	UPT Daerah	
41 PPP Mayangan	1	UPT Daerah	
42 PPP Sorong	1	UPT Daerah	
43 PPP Tegalsari	1	UPT Daerah	
44 PPS Lamulo	1	UPT Daerah	
45 PP Untia	2	PP Perintis	4
46 PP Teluk Awang	2	PP Perintis	
47 PP Selat Lampa	1	PP Perintis	
48 PP Sebatik	1	PP Perintis	
TOTAL	123		48

123 Orang

PEMBINA CPIB

➤ 90 PP UPT Pusat

➤ 27 PP UPT Daerah

➤ 6 PP Perintis

48 Pelabuhan

➤ 22 PP UPT Pusat

➤ 22 PP UPT Daerah

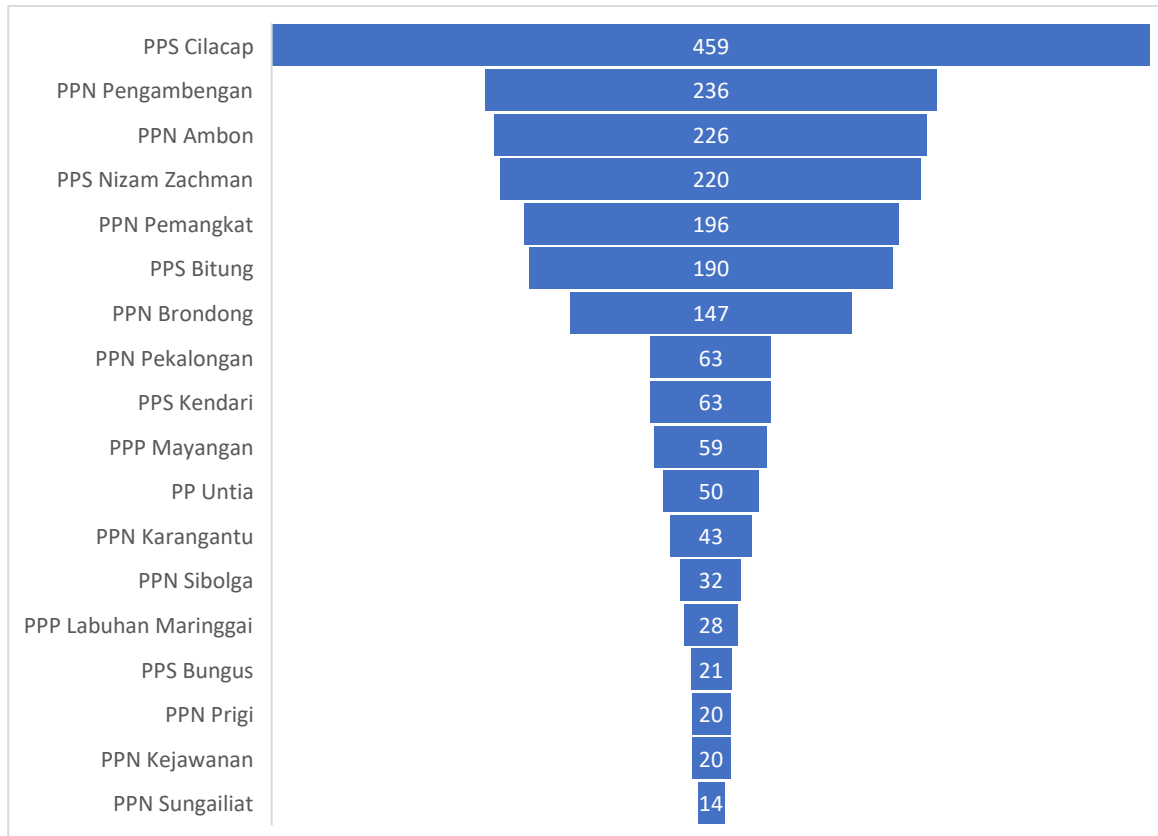
➤ 4 PP Perintis

Pelatihan dan Uji Kompetensi Petugas CPIB di Pelabuhan Perikanan, telah dilaksanakan sebanyak IV angkatan di BPPP Tegal

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan melalui Tim Kerja Tata Operasional Pelabuhan Perikanan melaksanakan tugas pembinaan untuk Bimtek CPIB di Pelabuhan Perikanan, sedangkan UPT Pelabuhan Perikanan selaku penyelenggara. Berikut adalah prosedur pelaksanaan Bimtek CPIB.

1. UPT PP Menyusun rencana pelaksanaan Bimtek CPIB.
2. Peserta mengisi form pendaftaran Bimtek dengan melampirkan KPT dan KUSUKA (jika ada).
3. UPT PP Bimtek mengambil foto peserta 3x4 (*background* merah).
4. Pemenuhan data-data sebagaimana angka 1,2, dan 3.
5. Pelaksanaan Bimtek CPIB.
6. Setelah pelaksanaan Bimtek, UPT PP menyampaikan surat kepada Direktur Kepelabuhanan Perikanan perihal permohonan Sertifikat Bimtek CPIB dengan melampirkan:
 - a. Waktu dan Lokasi pelaksanaan Bimtek;
 - b. Pamateri; dan
 - c. Jumlah, nama dan foto peserta.
7. Direktur Kepelabuhanan Perikanan menerbitkan Sertifikat Bimtek CPIB (cetak tandatangan basah) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, Direktorat Kepelabuhanan telah menerbitkan Sertifikat Bimbingan Teknis CPIB di Pelabuhan Perikanan sebanyak 2087 sertifikat di 9 pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan 1 Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, dengan rincian sebagai berikut:



Dari diagram tersebut, dapat dilihat bahwa PPS Cilacap merupakan pelabuhan perikanan dengan pelaksanaan Bimtek CPIB terbanyak dengan penerbitan sertifikat Bimtek sebanyak 459 sertifikat, dan PPN Sungailiat yang paling sedikit dengan penerbitan 14 sertifikat.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja baik

Indikator ini menunjukkan menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja minimal baik berdasarkan aplikasi PIPP. Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator adalah 16 %.

Penilaian Indikator Kinerja Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat kinerja minimal baik pada tahun 2025 belum dapat dilakukan secara keseluruhan karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Namun demikian untuk Triwulan III tahun 2025 terdapat 89 Pelabuhan Perikanan (20%) dengan Tingkat kinerja minimal baik. Pelabuhan-pelabuhan tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel. Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Triwulan III tahun 2025

No	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	NILAI	KATEGORI
1	PPP. Klidang Lor	100,00	SANGAT BAIK
2	PPP. Mayangan	100,00	SANGAT BAIK
3	PPS. Nizam Zachman Jakarta	99,92	SANGAT BAIK
4	PPN. Tegalsari	99,83	SANGAT BAIK
5	PPN. Pengambengan	98,92	SANGAT BAIK
6	PPN. Ternate	98,67	SANGAT BAIK
7	PPN. Pekalongan	98,58	SANGAT BAIK
8	PPP. Bajomulyo	98,50	SANGAT BAIK
9	PPN. Prigi	98,08	SANGAT BAIK
10	PPS. Bitung	98,00	SANGAT BAIK
11	PPN. Palabuhanratu	98,00	SANGAT BAIK
12	PPS. Kendari	97,67	SANGAT BAIK
13	PPN. Sibolga	97,33	SANGAT BAIK
14	PPN. Tanjungpandan	97,25	SANGAT BAIK
15	PPP. Labuhan Lombok	96,75	SANGAT BAIK
16	PPP. Muncar	96,75	SANGAT BAIK
17	PPS. Cilacap	96,50	SANGAT BAIK
18	PP. Teluk Awang	96,50	SANGAT BAIK
19	PPS. Belawan	96,42	SANGAT BAIK
20	PPN. Kejawan	96,17	SANGAT BAIK
21	PPN. Kwandang	95,92	SANGAT BAIK
22	PPN. Tasik Agung	95,92	SANGAT BAIK
23	PPN. Pemangkat	95,83	SANGAT BAIK
24	PPN. Brondong	95,25	SANGAT BAIK
25	PPP. Pondok Dadap	95,00	SANGAT BAIK
26	PPI. Larangan	94,75	SANGAT BAIK
27	PPP. Tamperan	94,33	SANGAT BAIK
28	PPP. Sungai Rengas	94,17	SANGAT BAIK
29	PPN. Sungailiat	94,00	SANGAT BAIK
30	PPP. Wonokerto	93,08	SANGAT BAIK
31	PPP. Batulicin	92,92	SANGAT BAIK
32	PPP. Bacan	92,58	SANGAT BAIK
33	PPI. Donggala	91,75	SANGAT BAIK
34	PPS. Bungus	91,33	SANGAT BAIK
35	PPN. Karangantu	91,33	SANGAT BAIK
36	PPN. Tual	91,17	SANGAT BAIK
37	PP. Logending	91,17	SANGAT BAIK

No	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	NILAI	KATEGORI
38	PP. Untia	91,17	SANGAT BAIK
39	PP. Sebatik	91,00	SANGAT BAIK
40	PPI. Tanjung Limau	90,83	SANGAT BAIK
41	PP. Manggar Baru	90,75	SANGAT BAIK
42	PP. Popoh	90,67	SANGAT BAIK
43	PPP. Morodemak	90,50	SANGAT BAIK
44	PPN. Ambon	90,08	SANGAT BAIK
45	PPP. Bulu	89,08	SANGAT BAIK
46	PPI. Tanjung Luar	89,00	SANGAT BAIK
47	PPP. Teluk Batang	88,67	SANGAT BAIK
48	PPP. Asemdayong	88,33	SANGAT BAIK
49	PPI. Pusong	88,08	SANGAT BAIK
50	PPN. Idi	87,00	SANGAT BAIK
51	PPP. Tumumpa	87,00	SANGAT BAIK
52	PP. Kuala Peukan Baro	87,00	SANGAT BAIK
53	PPP. Labuhanhaji	86,83	SANGAT BAIK
54	PPP. Tawang	86,75	SANGAT BAIK
55	PPI. Banjarmasin	86,58	SANGAT BAIK
56	PP. Keude Meukek	85,33	BAIK
57	PP. Tambakrejo	84,58	BAIK
58	PPI. Selili	83,33	BAIK
59	PPI. Ujong baroeh	82,75	BAIK
60	PPI. Muara Kintap	82,33	BAIK
61	PPI. Sambaliung	81,00	BAIK
62	PP. Sangatta	79,33	BAIK
63	PPP. Dobo	79,08	BAIK
64	PPI. Pasongsongan	79,08	BAIK
65	PP. Camplong	78,67	BAIK
66	PPI. Paranggi	78,58	BAIK
67	PPP. Kota Agung	77,25	BAIK
68	PPP. Ogotua	77,25	BAIK
69	PP. Api-Api	77,17	BAIK
70	PPP. Lekok	76,92	BAIK
71	PPP. Puger	76,58	BAIK
72	PPS. Lampulo	74,75	BAIK
73	PP. Sawang Ba'u	74,67	BAIK
74	PPP. Sadeng	74,58	BAIK
75	PPI. Kumai	73,42	BAIK
76	PP. Cikidang	72,83	BAIK

No	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	NILAI	KATEGORI
77	PP. Sine	72,50	BAIK
78	PP. Lhok Bengkuang	72,17	BAIK
79	PPP. Lempasing	70,33	BAIK
80	PP. Lambada	70,08	BAIK
81	PP. Kuala Tari	69,50	BAIK
82	PP. Tenau Kupang	69,25	BAIK
83	PPN. Muara Angke	68,75	BAIK
84	PP. Selat Lampa	68,50	BAIK
85	PPI. Kuala Pembuang	68,33	BAIK
86	PPP. Karimunjawa	66,83	BAIK
87	PPP. Sorong	66,83	BAIK
88	PP. Karangsong	66,17	BAIK
89	PP. Krueng Mane	66,00	BAIK

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 55 pelabuhan perikanan dengan nilai evaluasi kinerja Sangat Baik (rentang nilai 86,58 s.d 100) dan 34 pelabuhan perikanan dengan nilai evaluasi kinerja Baik (rentang nilai 66,00 s.d. 85,33).

Faktor Penentu Keberhasilan dari tercapai IK ini adalah:

1. Keaktifkan petugas pelabuhan perikanan untuk menginput data kedalam aplikasi Pusat Informasi Kepelabuhanan Perikanan.
2. Peningkatan pelayanan petugas untuk kegiatan pendataan produksi ikan hasil tangkapan, penerbitan persetujuan berlayar, dan laporan kedatangan kapal di pelabuhan perikanan
3. Pemanfaatan sistem informasi TemanSPB, elogbook, dan lain- lain untuk operasional dan pelayanan pelabuhan perikanan.
4. Penyediaan dan perbaikan fasilitas pokok, penunjang, fungsional pelabuhan perikanan
5. Peninjauan kembali parameter evaluasi kinerja

Faktor Penghambat dari tercapai IK ini adalah:

1. Tidak ada Sumberdaya Manusia di Pelabuhan Perikanan yang menangani PIPP.
2. Kurangnya anggaran untuk operasional dan pembangunan / perbaikan fasilitas pelabuhan perikanan.
3. Rendahnya kompetensi petugas pelabuhan perikanan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat

1. Melakukan sosialisasi /pembinaan /bimbingan teknis ke pelabuhan perikanan
2. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan dan perbaikan fasilitas di pelabuhan perikanan

Terkait indikator kinerja ini telah dilaksanakan rapat Pembahasan lanjutan simulasi penghitungan standar indikator penilaian Evaluasi Kinerja (EVKIN) Pelabuhan Perikanan pada aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan secara daring dan luring pada hari Selasa s.d. Kamis, 2 s.d. 4 September 2025, bertempat di Ruang Ruang Rapat Botia Balai Layanan Ikan Hias BBP3KP Raiser Cibinong. Rapat ini bertujuan untuk memperbaiki parameter penilaian evkin operasional pelabuhan perikanan, diantaranya dengan membedakan parameter antara UPT Pusat dan UPT daerah.

Dokumentasi



Indikator Kinerja (IK) 8 – Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Daerah yang melayani kapal perikanan laut dan tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan, selain yang berstatus Calon Pelabuhan (CP), yang tergabung dengan aplikasi PIPP. Target indikator kinerja ini sebesar 41%. Cara menghitungnya adalah pelabuhan perikanan yang terintegrasi PIPP dibagi dengan jumlah pelabuhan perikanan dalam RIPP No. 132/2023 sebanyak 455 lokasi.

IK Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena IK Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) belum dapat dilakukan penghitungan secara keseluruhan karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Namun demikian, untuk periode Triwulan III tahun 2025 terdapat penambahan 9 (sembilan) pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP, yaitu **Pelabuhan Perikanan (PP) Gebang Rejo, PP Amagarapati, PP Banggae, PP Katapop, PP Kuala Langsa, PP Mato, PP Moilong, PP Sidamukti, PP Swarangan**. Dengan demikian sampai dengan bulan September tahun 2025 terdapat total 274 (60%) pelabuhan perikanan yang telah terintegrasi dengan PIPP sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan PIPP

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
1.	PPS. Belawan	138.	PP. Campurejo
2.	PPS. Bitung	139.	PP. Cempae
3.	PPS. Bungus	140.	PP. Cikeusik
4.	PPS. Cilacap	141.	PP. Cikidang
5.	PPS. Kendari	142.	PP. Cisolok
6.	PPS. Lampulo	143.	PP. Cituis
7.	PPS. Nizam Zachman Jakarta	144.	PP. Dadap
8.	PPN. Ambon	145.	PP. Daeo Majiko
9.	PPN. Brondong	146.	PP. Dagho
10.	PPN. Idi	147.	PP. Dodepo
11.	PPN. Karangantu	148.	PP. Dompok
12.	PPN. Kejawanan	149.	PP. Dufa-Dufa
13.	PPN. Kwandang	150.	PP. Dulanpokpok
14.	PPN. Merauke	151.	PP. Eri
15.	PPN. Muara Angke	152.	PP. Falabisahaya
16.	PPN. Palabuhanratu	153.	PP. Fandoi
17.	PPN. Pekalongan	154.	PP. Gantung
18.	PPN. Pemangkat	155.	PP. Gebang Mekar
19.	PPN. Pengambengan	156.	PP. Gesing
20.	PPN. Prigi	157.	PP. Goto
21.	PPN. Sibolga	158.	PP. Grajagan
22.	PPN. Sungailiat	159.	PP. Hamadi Jayapura
23.	PPN. Tanjungpandan	160.	PP. Ie Meulee
24.	PPN. Tasik Agung	161.	PP. Inengo
25.	PPN. Tegalsari	162.	PP. Jakabaring
26.	PPN. Ternate	163.	PP. Jayanti
27.	PPN. Tual	164.	PP. Kajang
28.	PPP. Asemdayong	165.	PP. Kalar Kalar
29.	PPP. Bacan	166.	PP. Karanganyar
30.	PPP. Bajomulyo	167.	PP. Karangsong
31.	PPP. Batulicin	168.	PP. Kasiwa (Kasiwah)
32.	PPP. Blanakan	169.	PP. Katapop
33.	PPP. Bondet	170.	PP. Kema
34.	PPP. Bulu	171.	PP. Ketapang (Banyuwangi)
35.	PPP. Cilauteureun	172.	PP. Keude Meukek
36.	PPP. Ciparage	173.	PP. Kijang Bintang
37.	PPP. Dobo	174.	PP. Klademak

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
38.	PPP. Eretan (Wetan/Kulon)	175.	PP. Kluwut
39.	PPP. Karimunjawa	176.	PP. Kolonodale
40.	PPP. Klidang Lor	177.	PP. Kronjo
41.	PPP. Kota Agung	178.	PP. Krueng Mane
42.	PPP. Labuan	179.	PP. Kuala Jelai
43.	PPP. Labuhan Lombok	180.	PP. Kuala Langsa
44.	PPP. Labuhan Maringgai	181.	PP. Kuala Mempawah
45.	PPP. Labuhanhaji	182.	PP. Kuala Peukan Baro
46.	PPP. Lekok	183.	PP. Kuala Stabas Krui
47.	PPP. Lempasing	184.	PP. Kuala Tari
48.	PPP. Mayangan	185.	PP. Kuala Tuha
49.	PPP. Morodemak	186.	PP. Kuala Tungkal
50.	PPP. Muara Ciasem	187.	PP. Kurau
51.	PPP. Muara Sungai Baturusa	188.	PP. Lambada
52.	PPP. Muncar	189.	PP. Lappa
53.	PPP. Ogotua	190.	PP. Lasolo
54.	PPP. Paiton	191.	PP. Lero
55.	PPP. Pondok Dadap	192.	PP. Lhok Bengkuang
56.	PPP. Puger	193.	PP. Likupang
57.	PPP. Pulau Baai	194.	PP. Logending
58.	PPP. Sadeng	195.	PP. Lonrae
59.	PPP. Sorong	196.	PP. Lontar
60.	PPP. Sungai Rengas	197.	PP. Maccinibaji
61.	PPP. Tamperan	198.	PP. Manggar Baru
62.	PPP. Tawang	199.	PP. Mangolo
63.	PPP. Teladas	200.	PP. Manitinting
64.	PPP. Teluk Batang	201.	PP. Marisa
65.	PPP. Tobelo	202.	PP. Masarete
66.	PPP. Tumumpa	203.	PP. Masohi
67.	PPP. Wonokerto	204.	PP. Mato
68.	PPI. Air Bangis	205.	PP. Meureudu
69.	PPI. Banda	206.	PP. Minajaya
70.	PPI. Banjarmasin	207.	PP. Minaminanga
71.	PPI. Bawean	208.	PP. Moilong
72.	PPI. Birea	209.	PP. Moro
73.	PPI. Bonehalang	210.	PP. Ngemplakrejo
74.	PPI. Carocok Tarusan	211.	PP. Oeba
75.	PPI. Donggala	212.	PP. Pal Jaya

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
76.	PPI. Dumai	213.	PP. Pamayangsari
77.	PPI. Gebang Rejo	214.	PP. Pancer
78.	PPI. Gentuma	215.	PP. Panimbang
79.	PPI. Kalianda	216.	PP. Pante Raja
80.	PPI. Kambang	217.	PP. Paotere
81.	PPI. Kedonganan	218.	PP. Pasarwajo
82.	PPI. Ketapang	219.	PP. Pasir Baru
83.	PPI. Kotabaru	220.	PP. Piru
84.	PPI. Kuala Pembuang	221.	PP. Pontap
85.	PPI. Kuala Penet	222.	PP. Popoh
86.	PPI. Kumai	223.	PP. Poumako
87.	PPI. Larangan	224.	PP. Pulokali
88.	PPI. Manggar	225.	PP. Pulolampes
89.	PPI. Muara Kintap	226.	PP. Rancabuaya
90.	PPI. Muara Piluk Bakauheni	227.	PP. Rigah
91.	PPI. Pagimana	228.	PP. Rumbia Tengah
92.	PPI. Palipi	229.	PP. Sadai
93.	PPI. Paranggi	230.	PP. Salibabu
94.	PPI. Pasongsongan	231.	PP. Sampolawa
95.	PPI. Peudada	232.	PP. Sangatta
96.	PPI. Pulau Tello	233.	PP. Sanggeng
97.	PPI. Pusong	234.	PP. Sape
98.	PPI. Rangai	235.	PP. Sarang
99.	PPI. Sambaliung	236.	PP. Sawang Ba'u
100.	PPI. Sasak	237.	PP. Sebatik
101.	PPI. Selili	238.	PP. Selat Lampa
102.	PPI. Selakau	239.	PP. Selat Nasik
103.	PPI. Sikakap	240.	PP. Sidamukti
104.	PPI. Sodohoa	241.	PP. Sine
105.	PPI. Sungai Selan	242.	PP. Singkawang
106.	PPI. Sungsang	243.	PP. Soro Kempo
107.	PPI. Suka Bangun Ketapang	244.	PP. Soroadu
108.	PPI. Tanjung Balai Asahan	245.	PP. Soropia
109.	PPI. Tanjung Limau	246.	PP. Sungai duri
110.	PPI. Tanjung Luar	247.	PP. Sungai Jawi
111.	PPI. Tarempa	248.	PP. Sungai Kakap
112.	PPI. Teluk Santong	249.	PP. Surantiah
113.	PPI. Tenda	250.	PP. Swarangan

NO	PELABUHAN PERIKANAN	NO	PELABUHAN PERIKANAN
114.	PPI. Tiku	251.	PP. Tambakrejo
115.	PPI. Tilamuta	252.	PP. Tamher Timur
116.	PPI. Ujong baroeh	253.	PP. Tamping
117.	PPI. Ujung Serangga	254.	PP. Tandoleo
118.	PP. Aimere	255.	PP. Tanjung Sari
119.	PP. Amagarapati	256.	PP. Tanjungsari
120.	PP. Ampana	257.	PP. Teluk Awang
121.	PP. Amurang	258.	PP. Teluk Sinabang (Lugu)
122.	PP. Anak Laut	259.	PP. Tenau Kupang
123.	PP. Api-Api	260.	PP. Tengkeyu II
124.	PP. Atep Oki	261.	PP. Tiley
125.	PP. Bahaur	262.	PP. Torobulu
126.	PP. Banggae	263.	PP. Tual
127.	PP. Banyusangkah	264.	PP. Tulehu
128.	PP. Baran	265.	PP. Ujung Batu
129.	PP. Batu Tulis	266.	PP. Ujung Blang
130.	PP. Beba	267.	PP. Ukurlaran
131.	PP. Belang	268.	PP. Ulu
132.	PP. Bengkumat	269.	PP. Untia
133.	PP. Benjina	270.	PP. Wainin
134.	PP. Binuangeun	271.	PP. Waiya Depapre
135.	PP. Bonto Bahari Bulukumba	272.	PP. Waiyoho
136.	PP. Bonto Bahari Maros	273.	PP. Wameo
137.	PP. Camplong	274.	PP. Wetar

Faktor Penentu Keberhasilan dari tercapai IK ini adalah:

- Peran serta aktif dari pemerintah daerah dan pengelola pelabuhan perikanan untuk turut menggunakan Aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan pada pelabuhan perikanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Penempatan enumerator pendataan dari Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)/pengolah data untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.
- Pengembangan dan pengintegrasian Sistem Informasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan untuk lebih memudahkan dalam penggunaannya dan meningkatkan pemanfaatannya oleh para pengguna.
- Penyediaan anggaran dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan PIPP.

Faktor Penghambat dari IK ini adalah:

- Masih terdapat Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang belum menggunakan aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.
- Kurangnya Sumberdaya Manusia dan anggaran untuk operasional pelabuhan perikanan khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah.
- Aplikasi PIPP agar lebih mudah digunakan dan dimanfaatkan serta mengakomodir berbagai kebutuhan semua pihak dan perkembangan teknologi informasi.
- Kompetensi petugas PIPP yang masih harus terus ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat

- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelabuhan perikanan UPT Daerah.
- Mengusulkan anggaran Bimbingan Teknis Pusat informasi Pelabuhan Perikanan melalui dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, serta anggaran GEF, PHLN.
- Pengembangan aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.

Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan / kegagalan

- Penyediaan anggaran untuk Bimbingan Teknis dan pengembangan aplikasi PIPP,
- Penyediaan Sumberdaya Manusia enumerator/pengolah data PIPP.

Terkait indikator kinerja ini Telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan pada tanggal 5 s.d. 8 Agustus 2025 bertempat di Hotel Santika Premier Jakarta. Kegiatan BIMTEK diikuti oleh 28 (dua puluh delapan) orang yang berasal dari 23 (dua puluh tiga) pelabuhan perikanan UPT daerah dan 2 (dua) pelabuhan perikanan UPT pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih para enumerator guna melaporkan data pendaratan ikan serta kegiatan pelabuhan perikanan kedalam aplikasi PIPP, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada enumerator.



Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan

Indikator kinerja tingkat kinerja kesyahbandaran pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu peningkatan kapasitas SDM Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dengan bobot penilaian 40%, dan peningkatan jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan kesyahbandaran dengan bobot penilaian 60%.

Indikator kinerja tingkat kinerja kesyahbandaran di pelabuhan perikanan pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini yaitu sebagai berikut:

1. Pada triwulan III, tercatat mulai dari periode Triwulan I s.d III telah diterapkan kesyahbandaran di 273 Pelabuhan Perikanan, namun penerapan aplikasi TemanSPB baru di 190 Pelabuhan Perikanan dan tercatat total penerbitan STBLKK sebanyak 150.402 lembar dan PB sebanyak 151.724 lembar.
2. Sebanyak 197 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan telah ditempatkan dan ditugaskan di 273 Pelabuhan Perikanan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 22 Tahun 2025 tentang Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tanggal 8 September 2025.
3. Identifikasi dan updating jumlah Petugas Kesyahbandaran yang telah dilatih dan sudah bertugas di Pelabuhan Perikanan adalah sebanyak 399 orang. Dalam rangka optimallisasi SDM Petugas Kesyahbandaran tersebut, Direktur Kepelabuhanan Perikanan telah menyampaikan himbaun melalui surat B.3086/DJPT.4/PI.310/X/2025 kepada Kepala Dinas KP dan Kepala Pelabuhan untuk menugaskan Petugas Kesyahbandaran tersebut pada Pelabuhan Perikanan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Updating akun user TemanSPB pada beberapa Pelabuhan Perikanan baik UPT Pusat maupun UPT Daerah seiring dengan selesainya pelaksanaan Pelatihan Dasar Kesyahbandaran bagi Petugas Kesyahbandaran.
5. Dalam rangka pemenuhan SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan guna mendukung program prioritas KKP telah dilaksanakan beberapa hal yakni:
 - a. Rapat pembahasan rencana perpanjangan Keseakatan Bersama antara KKP dengan Kemenhub tentang Sinergitas Pelayanan Publik yang melibatkan Biro Perencanaan KKP, Biro Hukum KKP, Inspektorat V, Setditjen PT dan Direktorat KP;
 - b. Penyampaian Surat Direktur KP No. B.2632/DJPT.4/PI.310/IX/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Rekomendasi Teknis Diklat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran, Ditjen Hubla;
 - c. Rapat pembahasan Perpanjangan Kesepakatan Bersama dan Persiapan Diklat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tanggal 25 – 26 September 2025 di Hotel Permata Bogor yang dihadiri oleh perwakilan Kemenhub (Dit.KPLP, BP2TL),

perwakilan KKP (Biro Perencanaan, Dit. PSDI, Setditjen PT, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan) serta Tenaga Ahli TAO.

6. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Rutin Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan secara daring pada tanggal 10 Agustus 2025 dan 8 September 2025, yang dipimpin oleh Direktur Kepelabuhanan Perikanan dan dihadiri oleh Direktur Usaha Penangkapan Ikan bersama dengan Tim, Timja Kesyahbandaran serta seluruh Syahbandar baik di UPT Pusat maupun UPT Daerah. Rapat bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kesyahbandaran dalam rangka mendukung program prioritas KKP dan peningkatan pelayanan kesyahbandaran.
7. Pelaksanaan rapat pembahasan pengembangan aplikasi TemanSPB pada tanggal 18 September 2025 dengan tujuan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan yang berlaku untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Ujicoba pengembangan TemanSPB di PPS Nizam Zachman 29 September 2025 dan PPN Kejawatanan tanggal 1 Oktober 2025.

Terdapat beberapa penghambat dalam merealisasikan kegiatan pada triwulan III antara lain dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat tersebut adalah akan dilakukan pengusulan melalui anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang bersumber dari Pembiayaan Luar Negeri dan melalui proyek GEF-6.

Indikator Kinerja (IK) 10 – Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PSMA)

Indikator kinerja Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PSMA) adalah Tingkat kinerja pelayanan kapal berbendera asing yang di layani melalui mekanisme PSMA dan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu:

- a. Jumlah SDM yang memahami penerapan PSMA, dengan bobot penilaian 30%.
- b. Survey kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan AREP, dengan bobot penilaian 70%.

Indikator kinerja Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement* (PSMA) pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Pada periode triwulan III tahun 2025, telah dilakukan beberapa kegiatan dalam mendukung Indikator Kinerja ini sebagai berikut:

1. Direktorat Kepelabuhan Perikanan selaku Sekretariat Otoritas PSM di Indonesia telah menerbitkan 21 Notifikasi Penerimaan Kapal Asing Masuk ke Pelabuhan terhadap 27 Kapal Perikanan Berbendera Jepang dan 1 Kapal Berbendera Korea. Adapun tujuan kapal – kapal berbendera Jepang tersebut masuk ke Pelabuhan yang telah ditetapkan adalah dalam rangka untuk pergantian crew, pengisian perbekalan dan BBM sementara. Hasil pemeriksaan PSM ke-28 kapal perikanan berbendera asing tersebut telah dilaporkan dan disampaikan kepada PSMA Sekretariat - *Food and Agriculture Organization*, negara bendera dan organisasi perikanan regional terkait melalui aplikasi GIES.
2. Menghadiri Pertemuan *Regional Coordination Meeting on The FAO Agreement on Port State Measures and Complementary Instruments* pada tanggal 21 – 25 Juli 2025 di Davao, Philipina.
3. Pembahasan Interkoneksi Proses Bisnis Layanan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan dalam SINSW secara daring pada tanggal 1 September 2025 yang dipimpin oleh Kasubdit Kesyahbandaran dan dihadiri oleh perwakilan Kemenkeu LNSW (Dit. Efisiensi dan Proses Bisnis, Dit. Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan, Dit. Teknologi Informasi), Inspektorat II, Inspektorat V, Dit. UPI, Tim IT Pengembang dan Staf Subdit Kesyahbandaran.
4. Dalam rangka pemenuhan SDM Petugas Pemeriksa Kapal Asing, Sekretariat Otoritas PSM telah mengirimkan 1 orang sebagai delegasi untuk mengikuti Pelatihan PSM di Thailand yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh SEAFDEC.
5. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PSM pada triwulan III, yakni: Terbatasnya jumlah pelabuhan sebagai tempat pelaksanaan PSMA.
 - a. Belum adanya pembahasan dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas tentang Koordinasi penerapan PSMA pada pelabuhan PSM yang baru ditetapkan.
 - b. Terbatasnya jumlah Petugas PSM yang dikarenakan adanya rotasi beberapa Petugas ke Pelabuhan yang lain.
 - c. Terbatasnya sarana pendukung dalam rangka pelayanan pemeriksaan kapal asing di Pelabuhan yang telah ditetapkan; dan
 - d. Terbatasnya anggaran operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan PSM.
6. Beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi penghambat tersebut, diantaranya adalah:
 - a. Pengusulan petugas PSM untuk menghadiri ***First edition of the FAO International Course on Fisheries Law Enforcement, Busan, Republic of Korea***, dengan pembiayaan dari FAO.
 - b. pengusulan melalui anggaran Direktorat Kepelabuhan Perikanan yang bersumber dari Pembiayaan Luar Negeri dan melalui proyek GEF-6.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Indikator Tingkat kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dihitung berdasarkan:

- a. Peningkatan kapasitas SDM petugas SHTI yang ditetapkan, dengan bobot penilaian 30%.
- b. Peningkatan jumlah SDM Operator LA, dengan bobot penilaian 50%.
- c. Jumlah verifikasi SHTI dari negara importir, dengan bobot penilaian 20%.

Indikator Tingkat kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, pelaksanaan SHTI telah melaksanakan beberapa hal berikut:

1. Penerapan SHTI telah dilaksanakan 32 OKL dan 110 pelabuhan perikanan penerbit Lembar Awal, dengan perkembangan SHTI LT sebanyak 2.984 dokumen dan SHTI LTS sebanyak 585 dokumen dan LA-A sebanyak 2.984 dokumen, dan LA-B sebanyak 11.943 dokumen.
2. Penyampaian tanggapan atas permintaan verifikasi keabsahan dokumen SHTI dari negara tujuan ekspor pada periode Triwulan III tidak ada namun saat ini pihak UE masih menunggu penjelasan dari Pemerintah Indonesia terkait dengan digital sign pada form SHTI.
3. Masih terdapat kapal yang tidak terdaftar di RFMO namun melakukan penangkapan di wilayah konvensi RFMO.
4. Pembahasan rencana pengembangan aplikasi SHTI guna menyesuaikan dengan Digitalisasi SHTI dan ketentuan penerapan Certificate of Admissibility (COA) dengan pembiayaan dari anggaran PHLN.

Hal - hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan SHTI, diantaranya:

1. Keterbatasan anggaran pelaksanaan SHTI;
2. Database dan perlu updating aplikasi SHTI;
3. Kompetensi SDM Petugas SHTI yang perlu ditingkatkan.

Adapun upaya yang dilakukan guna mengatasi penghambat tersebut diantaranya adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat tersebut adalah pengembangan aplikasi SHTI melalui pendanaan Direktorat Kepelabuhan Perikanan yang bersumber dari Pembiayaan Luar Negeri.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Tingkat Penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang Ditetapkan.

Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam melaksanakan pengelolaan perikanan yang menjamin kelestarian sumber daya ikan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PP No.11/2023). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No.11/2023, Penangkapan Ikan Terukur (PIT) adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Permen KP No. 28/2023 Pasal 1 angka 15, Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan pangkalan tersebut tidak hanya Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/ atau dioperasikan oleh pemerintah pusat dan Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah daerah, namun juga termasuk Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta Pelabuhan Umum. Berdasarkan kebijakan PIT, kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur, wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan yang ditentukan dalam zona penangkapan ikan terukur. Penentuan dan penetapan Pelabuhan Pangkalan dimaksud dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Permen KP No. 28/2023). Oleh karena itu, rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur perlu ditetapkan.

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pasca produksi telah ditetapkan 296 pelabuhan pangkalan, dimanan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan dipelabuhan pangkalan tersbut memerlukan Sumberdaya manusia yang tidak sedikit antara lain keterlibatan syahbandar, enumerator dan validator di pelabuhan perikanan yang terampil, profesional, dan berdedikasi tinggi.

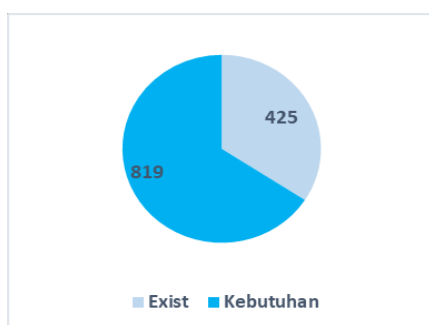
Sebagai bagian dari reformasi tata kelola perikanan yang efektif, kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi juga telah diterapkan untuk memastikan bahwa setiap hasil tangkapan berkontribusi pada pemasukan negara sesuai dengan nilai ekonominya.

Penerapan PNBP pascaproduksi ini bukan sekadar mekanisme penerimaan negara, tetapi juga sebagai upaya mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan mendatangkan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Setiap hasil tangkapan yang dipantau dan didata dengan baik akan memastikan pendapatan negara yang sebanding dengan pemanfaatan sumber daya yang diambil, sehingga negara dapat terus berinvestasi dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut.

Dinamika perubahan kebijakan yang sangat cepat terutama terbitnya peraturan-peraturan baru dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur dan penarikan PNBP Pasca Produksi, serta ketepatan dan kecepatan dalam mengidentifikasi jenis ikan yang didaratkan membutuhkan upaya peningkatan pengetahuan SDM secara berkelanjutan dengan pendekatan holistik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan, pada Pasal 1 Enumerator Kelautan dan Perikanan adalah petugas non-aparatur sipil negara yang melakukan kegiatan pengumpulan, pencatatan, verifikasi, pengolahan, analisis, dan pendokumentasian data di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumberdaya enumerator kelautan dan perikanan, Direktorat Kepelabuhanan perikanan telah melakukan perekrutan enumerator kelautan dan perikanan melalui jasa lainnya perorangan sejumlah 441 orang yang tersebar di 91 Pelabuhan pangkalan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.



Sampai dengan bulan September tahun 2025, terdapat 425 orang dari 441 orang yang direkrut pada awal tahun, karena berbagai alasan pengunduran diri. Jika dibandingkan dengan analisis beban kerja yang telah dihitung atas kebutuhan enumerator sebanyak 819 orang, jumlah tersebut sangatlah kurang.

Sebagai informasi bahwa sampai dengan bulan Juni 2025, telah terdapat 139 pelabuhan pangkalan yang telah menerapkan penarikan PNBP Pasca Produksi, dan jika dibandingkan dengan kondisi sebaran

petugas pendataan saat ini masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam pemenuhan tenaga enumerator.

Untuk mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya pelabuhan pangkalan, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap telah di tempatkan ASN lingkup direktorat Jenderal Perikanan tangkap dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pembina (dalam hal ini Pelabuhan Perikanan UPT Pusat) untuk melaksanakan pengawalan di Pelabuhan Pangkalan.

Indikator Kinerja (IK) 13 – Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pascaproduksi

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pasca produksi telah ditetapkan 296 pelabuhan pangkalan. Pelabuhan Perikanan untuk dapat ditetapkan menjadi Pelabuhan Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan telah memiliki fasilitas paling sedikit meliputi:

- a. fasilitas pokok terdiri atas tanah, dermaga, kolam pelabuhan, dan jalan;
- b. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran ikan, air bersih, dan listrik; dan
- c. fasilitas penunjang, yaitu mandi cuci kakus.

Dari 296 Pelabuhan Pangkalan yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan PIT dan yang memenuhi syarat sebagai pelabuhan pangkalan untuk penarikan PNBP pasca produksi merujuk pada peraturan yang ada harus dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.

Mengingat saat ini untuk pelaksanaan program prioritas Penangkapan Ikan Terukur (PIT) masih dalam masa relaksasi dan jumlah pelabuhan pangkalan yang telah memberikan kontribusi terdapat penerimaan PNBP Pasca Produksi sebanyak 134 pelabuhan pangkalan, maka perlu pelaksanaan evaluasi terhadap pelabuhan pangkalan dimaksud.

Dalam pelaksanaan evaluasi pelabuhan pangkalan ini sesuai dengan masukan dari Inspektorat Jenderal, maka Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap perlu membuat Juknis dan kriteria evaluasi untuk pelabuhan pangkalan.

Draft Juknis Evaluasi Pelabuhan Pangkalan saat ini sudah disusun dengan harapan juknis ini segera dapat digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pevaluasi pelabuhan pangkalan dan hasil evaluasi bisa digunakan untuk masukan terhadap Kepmen 187 tahun 2023.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional

Indikator ini menunjukkan Persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan Pasar Ikan bertaraf Internasional.

Proyek pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional dilaksanakan di PPN Pengambengan dan PPN Kejawan dengan dukungan pendanaan dari *Islamic Development Bank* (IsDB). Proyek ini bertujuan untuk mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sesuai standar internasional serta meningkatkan kualitas layanan bagi nelayan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai salah satu indikator kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan maka keberhasilan kinerja ditunjukkan dengan tercapainya pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN yang dihitung dengan besaran persentase. Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional pada triwulan III tahun 2025 ini adalah:

1. Pelaksanaan proyek pembangunan/pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Fish Market bertaraf Internasional

Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Fish Market bertaraf internasional, telah dilaksanakan penyusunan dokumen pelaporan pelaksanaan proyek sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan administrasi proyek serta mekanisme pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh pihak pemberi pinjaman dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen pelaporan tersebut meliputi:

- a. *Annual Work Plan (AWP)*, yang memuat rencana kerja tahunan proyek, termasuk rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta alokasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan perencanaan proyek.

- b. Risalah Persetujuan Proyek, merupakan dokumen yang berisi mengenai ruang lingkup pelaksanaan proyek, komitmen pelaksanaan, serta pengaturan administratif dan teknis sebagai dasar keberlanjutan kegiatan proyek.
- c. Dokumen Pendukung Proyek (Supporting Documents), yang terdiri atas dokumen teknis, administratif, maupun legal yang relevan dengan pelaksanaan proyek, termasuk kajian pendukung, data teknis, matriks logis proyek, serta dokumen pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan ketiga jenis dokumen tersebut dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan proyek dan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi pinjaman (Lender), serta merupakan bagian dari proses persiapan pelaksanaan kegiatan proyek secara akuntabel, terstruktur, dan terdokumentasi.

Sampai saat ini juga telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Fish Market bertaraf internasional secara rutin dan berkesinambungan. Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan melalui rapat koordinasi berkala yang dihadiri oleh Project Management Unit (PMU), Project Implementation Unit (PIU), Construction Management Consultant (CMC), dan Project Management Consultant (PMC). Rapat monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai forum resmi untuk melakukan pembahasan terhadap perkembangan kemajuan pelaksanaan proyek, termasuk:

- Progres fisik dan keuangan,
- Identifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan di lapangan,
- Pembahasan tindak lanjut penyelesaian isu teknis maupun administratif,
- Penyelarasan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan,
- Evaluasi risiko proyek serta langkah mitigasinya

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian proyek untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja, dokumen kontraktual, serta ketentuan yang berlaku.

Selain itu, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat administratif sebagai bagian dari dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan Proyek IFP IFM Phase I Lender IsDB. Beberapa kegiatan administrasi tersebut meliputi:

- a. **Pengajuan Replenishment Rekening Khusus**, sebagai mekanisme penarikan dana proyek sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman dan pedoman pembiayaan proyek. Pada TA. 2025 ini telah dilaksanakan replenishment Kedua untuk Periode Maret - September 2025 sebesar EUR 437.451,87
- b. **Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**, yang dilakukan berdasarkan pedoman pengadaan yang ditetapkan oleh Lender serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pengadaan dilaksanakan sesuai dengan nilai kegiatan, yaitu:
 - Untuk kegiatan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan;

- Untuk kegiatan dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Pelaporan Keuangan, yang disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana proyek secara transparan dan akuntabel. PMU. Pada saat ini telah disusun Laporan Keuangan Semester 1 TA. 2025
 - d. Permohonan No Objection Letter (NOL) untuk kegiatan proyek, yang diajukan kepada Lender sebagai bentuk persetujuan atas rencana pelaksanaan kegiatan tertentu sesuai prosedur manajemen proyek internasional.
 - e. Pengarsipan Kegiatan, yang dilaksanakan secara sistematis sebagai bagian dari tata kelola administrasi proyek serta penyediaan data dukung bagi audit dan evaluasi.
 - f. Penyusunan Laporan Tahunan kepada Lender, pada proyek yang didanai melalui Pinjaman Islamic Development Bank (IsDB), penyampaian laporan tahunan kepada Lender dilakukan dalam bentuk Project Implementation Supervision Report (PISR) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan kinerja proyek yang mencakup progres pelaksanaan fisik, realisasi keuangan, capaian output, evaluasi kendala pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut proyek.

Pelaksanaan kegiatan administratif tersebut merupakan bagian integral dari tata kelola proyek yang baik (*good project governance*), serta menjadi dasar bagi keteraturan pelaksanaan kegiatan proyek secara efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Monitoring dan Evaluasi pekerjaan Jasa Konsultansi CMC dan PMC.

Dalam rangka memastikan kelancaran penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED) untuk pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan *Fish Market* bertaraf internasional, dilakukan rapat mingguan yang melibatkan *Construction Management Consultant* (CMC), *Project Management Consultant* (PMC), dan tim teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat ini bertujuan untuk memonitor perkembangan setiap komponen DED, mengidentifikasi hambatan teknis maupun administratif, serta merumuskan tindak lanjut yang diperlukan agar progres pekerjaan tetap sesuai dengan jadwal.

Rapat mingguan ini juga menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan rencana kerja dan pembagian tugas antar tim, memastikan penyampaian deliverables tepat waktu, dan mengkomunikasikan perubahan atau penyesuaian desain yang diperlukan. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka dan *hybrid meeting* untuk memfasilitasi komunikasi lintas lokasi, termasuk penyampaian laporan kemajuan mingguan dari konsultan kepada manajemen proyek sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Persiapan Dokumen Pendukung Seleksi Pekerjaan Konstruksi di 2 lokasi (PPN Pengambangan dan PPN Kejawanen)

Sebagai bagian dari implementasi Proyek *Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP–IFM) Phase I* yang didanai oleh *Islamic Development Bank (IsDB)*,

kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi di dua lokasi utama Package 1 (**PPN Pengambangan - Bali**) dan Package 2 (**PPN Kejawanan - Jawa Barat**) — menjadi komponen krusial dalam memastikan dimulainya tahap pembangunan fisik secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan *IsDB Procurement Guidelines*.

a. Persiapan Dokumen Pendukung Seleksi Pekerjaan Konstruksi

Tahapan awal difokuskan pada penyusunan dan penyiapan dokumen pendukung seleksi, yang melibatkan beberapa langkah utama:

- 1) **Penyempurnaan *Detailed Engineering Design (DED)***: DED yang telah disusun oleh konsultan *Construction Management Consultant (CMC)* direviu secara komprehensif oleh *Project Management Consultant (PMC)* dan Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP untuk memastikan kesesuaian antara desain dan standar teknis konstruksi pelabuhan perikanan. Reviu meliputi bangunan laut (breakwater, dermaga, revetment, dan sebagainya) dan bangunan darat (gedung administrasi, area processing, fasilitas umum, dan sebagainya).
- 2) **Pembahasan Kewajaran Harga (RAB)**: Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilakukan pembahasan kewajaran harga sebagai dasar penetapan nilai perkiraan sendiri (OE) agar mencerminkan harga pasar yang rasional dan akuntabel.
- 3) **Penyusunan Dokumen Pengadaan (*Procurement Documents*)**: Dokumen lelang disusun mengacu pada *IsDB Procurement Guidelines for the Procurement of Goods, Works, and Related Services under IsDB Project Financing* (April 2019), termasuk *Prequalification (PQ)*, *Bidding Documents*, dan *Bid Evaluation Report (BER)*, dengan adaptasi terhadap sistem pengadaan elektronik SPSE ICB LKPP.
- 4) **Koordinasi dengan Lender (IsDB)**: Seluruh dokumen yang telah disiapkan diajukan secara bertahap kepada IsDB untuk memperoleh *No Objection Letter (NOL)* sebagai prasyarat tahapan prakualifikasi dan pelelangan konstruksi.

b. Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi

PPN Pengambangan – Bali (Package 1)

Prequalification (PQ):

NOL PQ Document diterbitkan IsDB pada 7 Mei 2025 melalui surat No. RH-I/2025/134 dan Pengumuman prakualifikasi dilakukan melalui SPSE ICB LKPP pada 3 Juni 2025.

Dari 34 perusahaan pendaftar, 9 perusahaan mengunggah dokumen PQ, dan hasil evaluasi menyatakan 4 peserta lulus prakualifikasi, yaitu:

- (i) China Road and Bridge Corporation – PT Nindya Karya (JO)
- (ii) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – PT WIKA Bangunan Gedung Tbk (JV)
- (iii) PT PP (Persero) Tbk – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (JV)
- (iv) PT China Harbour Indonesia

Persetujuan NOL untuk hasil evaluasi PQ telah diterbitkan pada 2 Oktober 2025 dan pengumuman shortlist pada 6 Oktober 2025.

Penyusunan dan Persetujuan Dokumen Lelang (Bidding Documents)

- Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah mengajukan *Draft Bidding Document* (DBD) kepada IsDB tanggal 19 September 2025, yang mencakup DBD, Bill of Quantity (BoQ), Technical Specification, Construction Drawings, Environmental and Social Management Plan (ESMP), serta Engineering Estimate. IsDB kemudian memberikan Conditional No Objection Letter (NOL) atas DBD *Package 1* dimaksud pada 24 September 2025.
- Proses tender resmi dimulai pada 3 Oktober 2025, dengan pelaksanaan:
 - (i) Aanwijzing daring pada 14 Oktober 2025,
 - (ii) Aanwijzing lapangan pada 17 Oktober 2025,
 - (iii) Berita acara penjelasan disampaikan kepada seluruh peserta tender pada 24 Oktober 2025.
- Dokumen *RFB Addendum* telah diunggah dalam sistem SPSE KKP pada **24 Oktober 2025**, dan telah proses pengajuan ke IsDB.
- Rencana penandatanganan Kontrak Desember 2024 dan Groundbreaking Januari 2025.

PPN Kejawanan – West Java (Package 2)

a) Prequalification (PQ):

NOL PQ Document diterbitkan IsDB pada 7 Mei 2025 melalui surat No. RH-I/2025/134 dan Pengumuman prakualifikasi dilakukan melalui LPSE KKP pada 25 Juni 2025.

Dari 125 perusahaan pendaftar, 10 perusahaan mengunggah dokumen PQ, dan hasil evaluasi menyatakan 7 peserta lulus prakualifikasi, yaitu:

- (i) PT Utama Karya (Persero)
- (ii) PT Adhi Karya (Persero) Tbk – JV PT Surya Mataram Sakti
- (iii) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
- (iv) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – JV PT WIKA Bangunan Gedung Tbk
- (v) PT Bumi Karsa
- (vi) PT Waskita Karya (Persero) Tbk – JV PT Basuki Rahmanta Putra
- (vii) PT Nindya Karya (Persero) – JV PT Sumber Teknik Konstruksi

Persetujuan NOL untuk hasil evaluasi PQ telah diterbitkan pada 15 September 2025 dan pengumuman shortlist pada 6 Oktober 2025.

b) Penyusunan dan Persetujuan Dokumen Lelang (Bidding Documents)

- Direktorat Kepelabuhanan Perikanan telah mengajukan *Draft Bidding Document* (DBD) kepada IsDB tanggal 19 September 2025, yang mencakup DBD, Bill of Quantity (BoQ), Technical Specification, Construction Drawings, Environmental and Social Management Plan (ESMP), serta Engineering Estimate. IsDB kemudian memberikan Conditional No

Objection Letter (NOL) atas DBD *Package 1* dimaksud pada 24 September 2025.

- Proses tender resmi dimulai pada 6 Oktober 2025, dengan pelaksanaan:
 - (i) Aanwijzing daring pada 13 Oktober 2025,
 - (ii) Aanwijzing lapangan pada 15 Oktober 2025,
 - (iii) Berita acara penjelasan disampaikan kepada seluruh peserta tender pada 20 Oktober 2025.
- Dokumen *RFB Addendum* telah diunggah dalam sistem SPSE KKP pada **20 Oktober 2025**, dan telah proses pengajuan ke IsDB.
 - Rencana penandatanganan Kontrak Desember 2024 dan Groundbreaking Januari 2025.

4. Sosialisasi/Supervisi/BIMTEK Bimbingan Teknis yang terkait penguatan kapasitas kelembagaan

a. Melakukan kegiatan FGD di PPN Pengembangan dan PPN Kejawan.

Sebagai bagian dari pendekatan partisipatif dalam penyusunan desain *Fish Market*, dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) di PPN Pengembangan dan PPN Kejawan. FGD ini melibatkan pengelola pelabuhan, pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah, serta perwakilan nelayan untuk menghimpun masukan terkait desain teknis dan operasional *Fish Market*. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan lapangan, meningkatkan efisiensi layanan pelabuhan, serta memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar.

Selain menjaring masukan, FGD juga menjadi sarana komunikasi dua arah untuk mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi selama implementasi proyek. Hasil diskusi digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan strategi implementasi, sekaligus memperkuat dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap proyek pembangunan pelabuhan perikanan ini.

b. Melakukan kegiatan *workshop Procurement* dengan IsDB.

Workshop procurement dengan *Islamic Development Bank* (IsDB) dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyelarasan proses pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan *guidelines* IsDB. Kegiatan ini mencakup pembahasan mekanisme *bidding*, persyaratan teknis, serta penyusunan dokumen pengadaan sesuai prosedur pendanaan internasional. *Workshop* ini juga menjadi forum konsultasi intensif antara tim pelaksana proyek, konsultan CMC dan PMC, serta perwakilan IsDB untuk memastikan kesesuaian dokumen pengadaan dengan standar yang berlaku.

Selain itu, *workshop* ini membahas rencana jadwal pelaksanaan pengadaan dan strategi percepatan agar tidak terjadi keterlambatan dalam tahapan konstruksi fisik. Melalui kegiatan ini, diperoleh pemahaman bersama mengenai proses



pengadaan sesuai aturan IsDB, termasuk langkah-langkah pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan proyek.

c. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sosialisasi dengan Pelaku Usaha di Bali.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) merupakan kegiatan koordinasi dan komunikasi strategis yang dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi kebijakan, memperkuat dukungan lintas sektor, serta meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Proyek Pembangunan/Pengembangan PPN Pengambengan.

Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap - KKP, Wakil Bupati Jembrana, perwakilan Forkopimda Provinsi Bali, perwakilan Forkopimda Kabupaten Jembrana, dan Para pejabat Eselon II dan III lingkup KKP dan Pemerintah Daerah.

Tujuan kegiatan ini adalah: (1) Membangun kesepahaman lintas sektor dalam mendukung pengembangan PPN Pengambengan; (2) Mendapatkan aspirasi dan masukan dari Pemerintah Daerah dan Forkopimda; (3) Terlaksananya konsolidasi lintas sektor untuk adanya komitmen dan dukungan Rencana Optimalisasi Kapal Perikanan dari Pelabuhan Benoa ke PPN Pengambengan dan Rencana Pengembangan PPN Pengambengan, sebagaimana disampaikan melalui Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.513/MEN-KP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025; dan (4) Terlaksananya pembangunan PPN Pengambengan tepat waktu, berjalan aman dan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dengan Pelaku Usaha di Bali. Kegiatan ini dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan dibuka dengan arahan oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Kepala PPN Pengambengan, Kepala Pangkalan PSDKP Benoa, Kepala Balai Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Denpasar, Direktur Poltek KP Jembrana, Ketua Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Ketua Asosiasi Perikanan Terpadu (Aspertadu), Ketua Kesatuan Pekerja Pelaut Perikanan Indonesia (KP3I), dan Para Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha Perikanan di Bali

Tujuan dari kegiatan ini diantaranya: (1) Membangun kesepahaman antara pemerintah dan pelaku usaha perikanan dalam mendukung rencana pengembangan PPN Pengembangan sebagai pelabuhan perikanan modern, terintegrasi dan bertaraf internasional; (2) Menyerap masukan, aspirasi, dan harapan dari pelaku usaha; dan (3) Mendorong terbentuknya kolaborasi dan komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan pembangunan pelabuhan dan transisi operasional usaha berjalan lancar, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu juga terdapat kegiatan pelatihan lainnya yang mendukung proyek ini terutama dalam peningkatan kapasitas kelembagaan bagi PMU dan PIU diantaranya adalah:

- Sosialisasi penerapan pengamanan terhadap Pelabuhan Perikanan sebagai Objek Vital Nasional;
- Penguatan/pengangkatan syahbandar di pelabuhan perikanan;
- Workshop Penyusunan Strategi Komunikasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Video)
- Bimbingan teknis terkait Penyusunan Laporan Keuangan PHLN TW. III TA. 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Indikator Kinerja (IK) 15 – Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan *Eco Fishing Port*

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan *Eco Fishing Port* pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep *eco fishing port* pada triwulan III tahun 2025 ini adalah:

1. Melaksanakan fungsi Project Management Unit (PMU)

Kegiatan pendampingan dalam melakukan survei project

Progres Bank Garansi

- a. Telah dilakukan konfirmasi terkait draft bank garansi sehingga prosesnya dapat dilanjutkan untuk pembayaran uang muka

- b. TAO mengkonfirmasi bahwa bank garansi yang diajukan akan melalui dua tahapan, yaitu (i) penjaminan dari bank ABN.AMRO kepada Bank Mandiri (Indonesia), dan kemudian (ii) Bank Mandiri akan menerbitkan bank garansi untuk PT Haskoning Indonesia JV COFREPECHE pada pekerjaan TAO Proyek Eco Fishing Port.

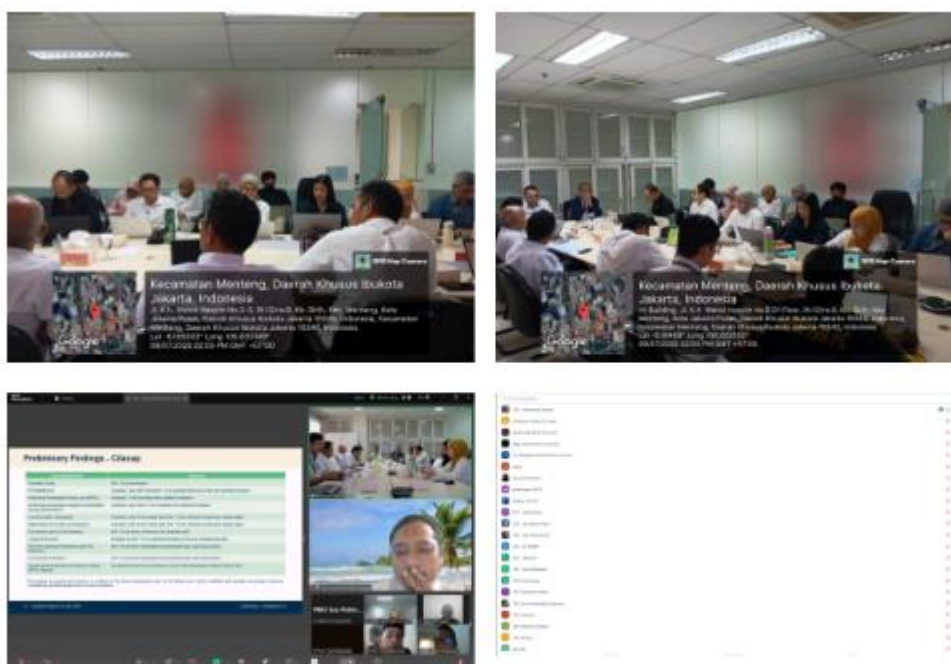
2. Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Pekerjaan Konsultan Perencanaan.

Technical Assistance to the Owner (TAO) merupakan jasa konsultansi yang mendukung PMU baik dalam pekerjaan infrastruktur dan dukungan manajemen proyek untuk seluruh komponen selama durasi proyek. Setelah berkontrak 11 Juni 2025, dilakukan beberapa pertemuan yang membahas tentang perkembangan pekerjaan konsultan perencanaan sebagai bahan monitoring dan evaluasi agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan target waktu yang disepakati dalam kontrak kerja.

Sebagai tahap awal dimulainya proyek, maka dilakukan *inception meeting* yang membahas tentang inception report yang berisi gambaran menyeluruh tentang rencana proyek sebagai roadmap sepanjang pengerjaan proyek. Inception report berisi informasi tentang latar belakang proyek di lokasi yang ditetapkan (PPS Blitung, PPS Belawan, PPS Cilacap dan PPS Kendari), ruang lingkup pekerjaan dan tujuan, metode pencapaian tujuan proyek baik pengumpulan data dan analisis data, konsep dasar dan pendekatan pengerjaan proyek yang digunakan, temuan teknis awal di lokasi proyek, rencana kerja dan jadwal, identifikasi risiko dan strategi mitigasi atas permasalahan lingkungan dan sosial dan struktur tim yang terlibat dalam pengerjaan proyek.

- a. Secara umum TAO telah mereview sebagian besar materi untuk kelengkapan Inception Report, diantaranya Project Background and Timeline, Methodology and Approach, Site Information and Findings, Summary of Existing E&S Studies, Brief summary of GAP Assessment, dan GAP Justification, Update Eco Fishing Port Infrastructure Action Plan.
- b. TAO belum menyampaikan rincian rencana kerja kedepannya, khususnya 6 bulan kedepan. Maka, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan data tambahan survey data primer dan sekunder serta rencana kerja kedepannya. Inception meeting telah dilaksanakan 2 kali sampai dengan finishing yaitu:
 - **Tanggal 3 Juli 2025**
Draft inception report untuk setiap lokasi Proyek Eco Fishing Port oleh konsultan meliputi latar belakang proyek, ruang lingkup pekerjaan, metodologi dan pendekatan, temuan awal dan tantangan, serta rencana dan jadwal pelaksanaan kerja. Selanjutnya, secara umum masih diperlukan perbaikan untuk materi Inception Report diantaranya pendalaman aspek perikanan tangkap (profil, proses bisnis, dan proses pelayanan) dan penyelarasan proyek dengan kondisi terkini di lingkup KKP pada materi inception report.
 - **Tanggal 10 Juli 2025**
Penyempurnaan Draft Inception Report, detail work plan, pembaruan data, dan rencana survey dapat mendukung target pelaksanaan tender konstruksi pada akhir tahun 2025.

- TAO telah mengirim surat ke KKP terkait rencana site visit survey untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan PIU di 4 lokasi proyek Eco Fishing Port.
- TAO menyusun work plan dan timeline yang komprehensif mencakup metode, mobilisasi alat dan bahan, pelaksana, titik dan posisi kegiatan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak yang akan diajak berkoordinasi agar kegiatan berjalan lancar.
- TAO telah menyusun konsep umum ruang lingkup pekerjaan sebagai dasar PQ Pengadaan Konstruksi, guna memastikan pekerjaan dapat dimulai pada Januari 2026.



Selama Juli - September telah dilakukan rapat perkembangan progres pekerjaan TAO yaitu:
Juli

3 Jul	Pembahasan Draft Inception Report serta Penyampaian Rencana Kerja TAO Proyek Outer Ring Fishing Port SDevelopment (Eco Fishing Port)	a. Rapat pembahasan lanjutan terkait draft inception report pada Kamis, 10 Juli 2025 (tentative). b. Penyampaian usulan perubahan Tenaga Pendukung (Non-Key Expert) oleh TAO kepada PMU Eco Fishing Port pada minggu ke-2 Juli 2025.
9 Jul	Pembahasan Tindak Lanjut mengenai Draft Inception	a. Rapat pembahasan lanjutan draft inception meeting diusulkan pada tanggal

	Report serta Penyampaian Rencana Kerja TAO Proyek Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port)	15 Juli 2025 untuk TAO menyampaikan perbaikan atas hasil pembahasan sebagaimana disampaikan pada butir 2 dan 3; b. TAO agar segera mengirimkan surat kepada PMU terkait rencana site visit survey untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan PIU di 4 lokasi proyek Eco Fishing Port; dan c. Terkait target pelaksanaan konstruksi proyek Eco Fishing Port (November 2025), TAO agar segera menyusun strategi pengadaan jasa konstruksi dan konsep tahapan prakualifikasi (PQ).
14 Jul	Rapat Pembahasan Lanjutan Draft Inception Report serta Penyampaian Rencana Kerja TAO Proyek Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port)	a. TAO agar menyampaikan rincian rencana kerja terkait pengembangan infrastruktur kedepannya paling lambat Jumat, 18 Juli 2025 . Rencana kerja dimaksud perlu menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penyelesaian kebutuhan dokumen dan hasil gap assessment (terlampir referensi daftar action plan). b. TAO agar memulai penugasan tim tenaga ahli di tingkat pelabuhan pada minggu ke-3 Juli 2025. c. Diagendakan pembahasan atas observasi dan pengumpulan data lapangan pada minggu ke-4 Juli 2025.

Rencana tindaklanjut hasil rapat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. TAO agar menyampaikan rincian rencana kerja terkait pengembangan infrastruktur kedepannya paling lambat **Jumat, 18 Juli 2025**. Rencana kerja dimaksud perlu menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penyelesaian kebutuhan dokumen dan hasil *gap assessment* (terlampir referensi daftar *action plan*).
- b. TAO agar memulai penugasan tim tenaga ahli di tingkat pelabuhan pada minggu ke-3 Juli 2025.

- c. Diagendakan pembahasan atas observasi dan pengumpulan data lapangan pada minggu ke-4 Juli 2025.

September

1. Audiensi Pembahasan Progress Perencanaan Infrastruktur Proyek Eco Fishing Port di PPS Bitung

Sehubungan telah dilaksanakannya Audiensi Pembahasan Progress Perencanaan Infrastruktur di PPS Bitung Proyek Eco Fishing Port tanggal 30 September - 2 Oktober 2025 (sebagaimana Surat Undangan Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor B.2984/DJPT.4/TU.140/IX/2025), bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan dimaksud telah dilaksanakan secara hybrid pada hari Selasa - Kamis, 30 September - 2 Oktober 2025 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung yang dipimpin oleh Boma Kresning, Ketua Tim Kerja Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pembiayaan Luar Negeri (P5LN) Lender AFD dan dihadiri oleh Bapak Makkasau, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung; Bapak Henry M. Batubara, Narasumber Pembahas; Para Ketua Tim Kerja PPS Belawan; Bapak M yamin, Co-Team Leader Jasa Konsultansi *Technical Assistance to the Owner* (TAO) Proyek *Eco Fishing Port* dan Tim Kerja Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pembiayaan Luar Negeri Lender AFD.
- b. Rapat bertujuan untuk membahas rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur PPS Belawan melalui Proyek Eco Fishing Port
- c. Berdasarkan hasil kegiatan dimaksud, dilaporkan hasil sebagai berikut:
 - Konsultan TAO membuat analisa antara layout eksisting dan layout rencana pengembangan mempertimbangkan kriteria desain dan kegiatan operasional PPS Bitung diantaranya, i) pembongkaran ikan dengan produk tuna segar, cakalang segar, pelagis kecil, cakalang beku, ii) mekanisme penimbangan ikan, iii) kebutuhan sortir kan, dan iv) transportasi dan distribusi ikan dengan truk.
 - Konsultan TAO perlu melakukan estimasi terhadap kebutuhan air bersih tawar dan air laut bersih untuk mendukung operasional pelabuhan. Pada saat ini, sudah terdapat rencana untuk pembuatan reservoir air bersih tawar dan pompa untuk air laut bersih. Sebagai tambahan, diperlukan survey titik potensi sumber air tanah di area PPS Bitung mengingat air tawar yang sudah tersedia belum mencukupi untuk aktivitas keseluruhan PPS Bitung serta kualitas air masih kurang bagus dikarenakan mengandung kadar zat besi yang cukup tinggi sehingga memerlukan proses lebih lanjut sebelum dapat dimanfaatkan secara optimal.
 - Konsultan TAO perlu mendetailkan rencana Perpanjangan Dermaga T direncanakan ke arah utara sejauh 25 meter dan ke arah selatan sejauh 75 meter untuk meningkatkan kapasitas sandar kapal serta memperlancar arus

bongkar muat. Pelebaran *trestle* akan menggunakan metode *Deck on Pile* selebar 33 meter dengan fokus pada penambahan kapasitas, kestabilan struktur, serta kemudahan akses alat berat dan kelancaran bongkar muat Kapal Perikanan.

- Konsultan TAO berkoordinasi dengan PMU dan PPS Bitung untuk kebutuhan relokasi terumbu karang di sekitar PPS Bitung yang menjadi kendala pada saat pembangunan area Dermaga T sesuai dengan rekomendasi AFD. Kegiatan pemindahan terumbu karang perlu dilakukan pendetailan lebih lanjut dan dilaksanakan sesuai ketentuan lingkungan yang berlaku.
 - Berita Acara dimaksud tercantum sebagai lampiran dalam surat ini.
- d. Adapun rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:
- Konsultan TAO agar menyampaikan secara tertulis rincian daftar kegiatan survey teknis diantaranya, survey geoteknik, survey topografi dan batimetri, dan survey pasang surut, dan survey kekuatan struktur eksisting / bangunan kepada PPS Bitung sebagai langkah monitoring terhadap pekerjaan yang dilakukan.
 - Diharapkan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh TAO dapat diselesaikan pada minggu ke-3 Oktober 2025, disampaikan ke PIU (PPS Bitung) yang kemudian dapat dibahas kembali dengan PMU

2. Pelaksanaan kegiatan Audiensi Pembahasan Progress Perencanaan Infrastruktur di PPS Belawan Proyek Eco Fishing Port pada tanggal 24 s.d 26 September tahun 2025.

3. Pengajuan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan proyek eco fishing port dan mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Berbasis Kuota kepada lender (AFD).

Kebijakan PIT diimplementasikan lewat program atau kegiatan di setiap tim kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Setelah dilakukan identifikasi kegiatan sesuai dengan komponen dalam *readiness criteria* dan pagu kegiatan PHLN, maka terdapat potensi pembiayaan pinjaman luar negeri dari AFD untuk kegiatan pendukung implementasi PIT yang berupa kegiatan non konstruksi. Tindak lanjut hal ini adalah dilakukannya rapat *steering committee* dengan hasil rapat bahwa AFD mendukung penyelarasan kegiatan proyek *Eco Fishing Port* selama kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan proyek *Eco Fishing Port*.

Selain kegiatan revisi RKA-KL, secara bersamaan juga dilakukan pengusulan kegiatan yang akan direview oleh AFD selaku pemberi pinjaman (*lender*) untuk mendapatkan *No Objection Letter* (NOL). Dokumen yang disampaikan adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan dokumen perencanaan yang menjelaskan secara rinci tujuan, ruang lingkup, metode, dan hasil yang diharapkan dari kegiatan atau proyek. Selain itu juga dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menggambarkan besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Rapat koordinasi penyiapan *alignment* kegiatan dilakukan dengan tujuan agar masing-masing tim kerja sebagai pelaksana kegiatan dapat mengetahui alokasi yang diberikan untuk kegiatan yang diusulkan dan sosialisasi mekanisme pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan pinjaman luar negeri sesuai dengan *procurement guidelines* yang ditetapkan oleh AFD.

Terkait dengan hasil pelaksanaan rapat *Steering Committee*, maka dilakukan update terhadap *readiness criteria* sebagai dokumen yang diacu yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum usulan proyek dilakukan.

Sasaran Kegiatan (SK) 2 – Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indikator Kinerja (IK) pada SK 2 yaitu:

- IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 16 – IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indeksi Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme ASN di Indonesia. Indeks ini dikembangkan oleh Badan Kepegawai Negara (BKN) sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana ASN menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Kriteria pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan pengukuran.
- b. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pengukuran.

- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran.
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan pengukuran.

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada semester III tahun 2025 tidak dilakukan perhitungan karena ditargetkan semesteran.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan capaian Indikator Kinerja ini adalah mendorong serta memonitor partisipasi pegawai Direktorat Kepelabuhanan untuk ikut serta dalam pelatihan maupun seminar yang dapat mendukung kinerja, dan mengunggah sertifikat pelatihan dan seminar yang didapat kedalam aplikasi MyASN.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Indikator ini menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan kepada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berdasarkan LHP yang terbit pada periode Oktober 2024 - Juni 2025 yang dokumennya telah ditindaklanjuti dan disampaikan (status tindak lanjut adalah tuntas dan/atau proses) oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Tabel 5. Capaian IK “Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan” Triwulan III Tahun 2025

SK 2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan										
IK 17		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)										
Realisasi 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT		
TW III Tahun 2020	TW III Tahun 2021	TW III Tahun 2022	TW III Tahun 2023	TW III Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Realisasi thd target TW III	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun 2025 thd Target Akhir Renstra	
100	100	100	100		85	85	96	112,94		-		

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Pada triwulan III Tahun 2025, capaian IK ini adalah 96% dari target 85%, dengan persentase capaian 112,94%. Rekapitulasi laporan

hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun pada triwulan III Tahun 2025 periode Oktober 2024-Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Laporan hasil pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

No	Pengawasan	Satker	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Setelah Tindak Lanjut			Ket
					Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Pemantauan	DIT PP	R.476/ITJ.2/HP.550/XI/2024	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut DG Sante Triwulan III pada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
22	Reviu	DIT PP	R.606/ITJ.2/HP.130/XII/2024	Hasil Probit Audit Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Pelabuhan Perikanan le Meulee Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang Provinsi Aceh	4	8	-	4	8	-	-	-	-	TUNTAS
29	Reviu	DIT PP	R.46/ITJ.2/HP.380/II/2025	Hasil Reviu atas Permohonan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Perkuatan Struktur Seawall Pelabuhan Perikanan Takur SKPT Moa	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
32	Reviu	DIT PP	R.99/ITJ.2/HP.380/III/2025	Hasil Reviu Dokumen Prakuifikasi Tender Pekerjaan Konstruksi PPN Pengembangan dan Pekerjaan Konstruksi PPN Kejawanan	5	6	-	5	6	-	-	-	-	TUNTAS
34	Reviu	DIT PP	R.150/ITJ.2/HP.380/VI/2025	Hasil Reviu atas Permohonan CCO Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Perikanan le Meulee SKPT Sabang Provinsi Aceh	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
36	Pemantauan	DIT PP	R.183/ITJ.2/HP.550/VI/2025	Hasil Pemantauan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan le Meulee Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025	4	9	-	3	8	-	1	1	-	PROSES
Total						28			27					

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat 6 (enam) kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Berdasarkan rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan, terdapat 28 (dua puluh delapan) temuan dan 27 (dua puluh tujuh) saran yang telah ditindaklanjuti, sehingga terdapat sisa temuan sebanyak 1 (satu) saran yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, akan dilakukan pemantauan secara berkala dalam pemenuhan data dukung tindak lanjut temuan pada aplikasi SIDAK.

Indikator Kinerja (IK) 18 – Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **136,489,336,000**. sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nomor DIPA: SP-DIPA 032.03.1.238720/2024 tanggal 28 November 2024. Revisi DIPA ke-11, tanggal 2 September 2025, anggaran sebesar 196.328.429.000 menjadi 164.351.971.000.

Anggaran tersebut dengan kegiatan utama Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 109.418.971.028, dengan persentase capaian 33,42%.

Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Indikator Kinerja (IK) 19 – Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan



Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja

Nilai PM SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Kepelabuhanan.

Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan penghitungan, karena Indikator Kinerja ini ditargetkan tahunan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, pada tanggal 8-11 Juli 2025 di PPN Kejawanan. Dalam kegiatan ini, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan diikutsertakan menjadi *sampling* dalam evaluasi implementasi SAKIP bersama Direktorat KAPI, PPN Tanjung Pandan, dan PPS Cilacap.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **136,489,336,000**. sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nomor DIPA: SP-DIPA 032.03.1.238720/2024 tanggal 28 November 2024. Anggaran tersebut dengan kegiatan utama Program Pengelolaan Perikanan

dan Kelautan. Capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp 109.418.971.028, dengan persentase capaian 33,42%.

Tabel 7. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran TW III 2025 (pagu revisi)	Realisasi Anggaran TW III 2025	NPSS	% Realisasi Anggaran
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggungjawab	164.351.971.000.	109.418.971.028	120	33,42
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	-	-	97,72	-

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan III Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama pelaksanaan Triwulan III Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa ada 2 Indikator Kinerja yang perhitungannya dilakukan pada triwulan II, yaitu:

1. Persentase Pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen), dari target yang ditetapkan sebesar 40%, telah tercapai pada triwulan III sebesar 55%. Capaian tersebut meliputi:
 - a. Penyiapan dokumen perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(10%)**.
 - b. Penyiapan dokumen tender/pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(15%)**.
 - c. Pembahasan dan penyiapan dokumen kontrak konstruksi Pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan **(20%)**.
 - d. Penyiapan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan **(10%)**
 - e. Pengendalian pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan **(17,143%)**.
 - f. Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan **(8,571%)**.
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Pada triwulan III Tahun 2025. Capaian IK ini adalah 96% dari target 85%, dengan persentase capaian 112,94%. Capaian dimaksud merupakan hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal melalui aplikasi SIDAK untuk periode triwulan III Tahun 2025 periode Oktober 2024-Juni 2025 sebanyak 28 (dua puluh delapan) temuan dan 27 (dua puluh tujuh) saran yang telah ditindaklanjuti .

Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

1. Telah dilakukan pengarahan kepada seluruh ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan untuk meningkatkan partisipasi dalam peningkatan IP ASN.
2. Pada triwulan III Tahun 2025 telah diselesaikan tindaklanjutan atas LHP Itjen pada aplikasi SIDAK dengan persentase 95.36%.

Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Mengarahkan kepada seluruh ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan untuk meningkatkan partisipasi dalam peningkatan IP ASN.
2. Menyelesaikan tindaklanjut atas LHP Itjen pada aplikasi SIDAK di TW III Tahun 2025, khususnya pada tim kerja Pembangunan Pelabuhan Perikanan.

LAMPIRAN

